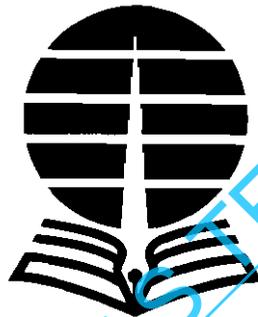


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM OPTIMALISASI
PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR
DI KECAMATAN WEWEWA SELATAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

LUKAS TAMO AMA

NIM: 018396804

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2013

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARI

TAPM yang berjudul Peran Komite Sekolah dalam Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dasar Di Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik pencabutan ijazah dan gelar

Kupang,.....Oktober 2013



(Lukas Tamo Ama)
NIM: 018396804

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Peran Komite Sekolah Dalam Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dasar Di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya

Penyusun TAPM : Lukas Tamo Ama
NIM : 018396804
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Minggu 13 Oktober 2013

Menyetujui :

Mengetahui,
 Pembimbing I,

Pembimbing II,

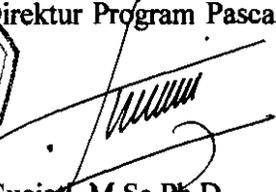

 Dr. Ajis Sajim Adang Djaha, M.Si
 NIP. 196404051990031004

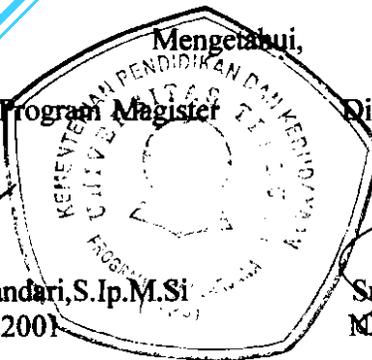

 Prof. Dr. H. Udin S. Winata Putra, MA
 NIP. 194510071973021001

Ketua Bidang Ilmu / Program Magister
 Administrasi Publik


 Florentina Ratih Wulandari, S.Ip.M.Si
 NIP:197106091998022001

Direktur Program Pascasarjana


 Suciani, M.Sc Ph.D
 NIP:195202131985032001



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

N a m a : Lukas Tamo Ama
N I M : 018396804
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Peran Komite Sekolah Dalam Optimalisasi Pelayanan
Pendidikan Dasar Di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten
Sumba Barat Daya

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji TAPM Program
Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 13 Oktober 2013
W a k t u : 19.00-21.00
dan telah dinyatakan LULUS

KOMISI PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Drs. Alam Malau, M.Si


.....

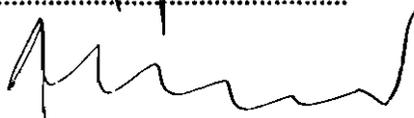
Penguji Ahli :
Prof. Dr. Sangkala


.....

Pembimbing I :
Dr. Ajis Salim Adang Djaha, M. Si


.....

Pembimbing II :
Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A


.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Fokus kajian penulis adalah peran Komite Sekolah dalam optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sehubungan dengan rampungnya TAPM ini, banyak pihak yang membantu. Untuk itu dengan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada:

- (1) Pembimbing I, Dr. Ajis Salim Adang Djaha, M.Si. yang selalu membantu, memberi kiat-kiat guna penyelesaian TAPM.
- Pembimbing II, Prof Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A yang memberikan dukungan penuh makna melalui komunikasi via sms.
- (2) Ketua UPBJJ Kupang selaku penyelenggara Program Pascasarjana.
- (3) Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka
- (4) Kepala Bidang UPBJJ Kupang Program Magister..
- (5) Bapak Bupati Sumba Barat Daya yang memberikan dukungan moril, serta bapak Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah rela memberikan ijin penelitian, di Kecamatan Wewewa Selatan dan Bapak Kepala Dinas PPO Kabupaten Sumba Barat Daya yang memberikan kemudahan guna memperoleh data yang dibutuhkan, lebih khusus Bapak Camat Wewewa Selatan yang menemani penulis, ketika berada di lokasi penelitian dan bapak –ibu responden penelitian yang rela mengorbankan waktu dan pikiran guna mengisi kuisioner atau lembaran pertanyaan dan kesediaannya menerima penulis melakukan studi dokumentasi, serta saudara setia saya Siprianus Muda Hondo, dan Ibu Yayuk Lestari, SE, selaku operator computer SMPN I Wewewa Selatan, yang bantu memperlancar secara teknis tugas-tugas perkuliahan serta semua teman mahasiswa yang walaupun dalam kesibukan, tetapi terus saling mengingatkan untuk maju bersama.
- (6) Last but not least Getrudis KS dan mama Getrudis Wini Gollu yang dengan bangga serta caranya sendiri mendorong untuk terus berjuang menyelesaikan perkuliahan ini.

TAPM ini belum sempurna. Maka dengan rasa hormat dan jiwa besar, Penulis menyajikan kepada tim penguji sidang yang amat berwibawa ini untuk dinilai serta ditelaah untuk perbaikannya. Kritik dan saran untuk semakin layak dan berbobot menjadi harapan penulis, dan dengan besar hati dalam semangat ilmiah, penulis menerima semua itu dengan lapang dada.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat dan rahmat-Nya untuk kita semua.

Kupang, Oktober 2013
Penulis

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM OPTIMALISASI
PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN
WEWEWA SELATAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Paradigma baru manajemen dewasa ini adalah kalaborasi sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, Maka penyelenggaraan pendidikan membutuhkan sumberdaya eksternal dan internal. Untuk mengetahui peran komite, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Peran Komite Sekolah Dalam Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dasar Di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya

Komite sekolah diartikan sebagai suatu badan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah di tingkat satuan pendidikan. Kehadiran Komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu mendeskripsikan peristiwa, perilaku atau keadaan pada tempat tertentu secara mendalam dalam bentuk narasi. Populasi ada 48 orang dan sampelnya 24 orang dengan teknik analisis adalah rentang kriteria. Respondennya 28 orang terdiri dari 18 laki-laki dan 10 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan ada 22 orang sarjana dan 6 SMA

Komite berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung bagi penyelenggaraan pendidikan, sebagai pengontrol terhadap keberhasilan pendidikan dan memediasi pemerintah, sekolah dan masyarakat dalam program pelayanan

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Peran komite dalam memberi pertimbangan dari aspek kebijakan mencapai skor nilai 77, kategorinya cukup baik, dalam memberi pertimbangan dari aspek program pendidikan sekolah mencapai skor nilai 96 kategorinya baik, dalam memberi pertimbangan dari aspek rencana anggaran dan belanja sekolah mencapai skor nilai 107 kategorinya baik.

Peran komite dalam member pertimbangan mencapai skor nilai 90 dengan kategori baik, sedangkan dukungan dari aspek menggalang dana mencapai skor nilai 70, kategorinya kurang baik. Demikian juga member dukungan mencapai skor nilai 114, kategorinya baik.

Peran komite dalam member control dari aspek evaluasi kegiatan mencapai skor nilai 79, kategorinya baik, dari aspek melakukan pengawasan mencapai 100 dan kategorinya baik.

Peran komite dalam memediasi kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah mencapai skor nilai 102 dan kategori baik dari aspek menampung aspirasi mencapai skor nilai 111 dengan kategori baik

Ke depan disarankan agar komite sekolah meningkatkan perannya dalam member pertimbangan, dukungan, mengontrol dan memediasi terhadap program peningkatan mutu pelayanan pendidikan di satuan pendidikan dasar di Kecamatan Wewewa Selatan

Kata-kata kunci: *Peran Komite Sekolah, pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung*

ABSTRACT**THE ROLE OF SCHOOL BOARD TO MAKE THE BEST BASIC EDUCATION SERVING OF SUBDISTRICT SOUTH WEWEWA IN SOUTHWEST SUMBA REGION****Lukas Tamo Ama****Universitas Terbuka****Lukas.tamoama@yahoo.co.id**

The new paradigm management of education demands collaboration between school, society and government for doing education. To do the activity of education, it needs outside resources and inside resources. To find out roles of schoolboard, the writer carries out a research with the title "The role of schoolboard to make the best of basic education serving of subdistrict south Wewewa in southwest Sumba region.

The schoolboard is meant a group of working committee, corporate body, non profit body is composed at the level of school. The attendance schoolboard have a role of giving consideration endorsement, control and relationship.

The way of doing research is qualitative method. That is to describe action, a certain behavior or situation into one place in narration. The total of population are forty eight people. There are twenty four sampling. The technique analysis is scalo criteria. The key informan are twenty eight people. There are eighteen men and ten women. Based on the quality of education, there are twenty two informan have scholar and six informan have finished their school at senior high school.

The schoolboard has roles to give consideration, to support in education activity, to control successfullness of education, to put society in contact between school, and government in program supplying

From detail examination, the writer finds out roles of schoolboard gives consideration from aspect discretion achieve the score value seventy seven. It is category enough good or average. Giving consideration for school program achieve the score ninety six. It is category is good. Consideration to plan budgeting achieve the score value an hundred and seven the category is good.

The role of schoolboard gives consideration achieve the score ninety. The category is good. While supporting fund achieve the score value seventy. It is category fair to poor. But supporting aspect achieve score value an hundred and fourteen. It is category excellent. The role of schoolboard to control an aspect evaluation activity of school, achieve the score seventynine. The score is good. But controlling aspect supervision achieve the score on hundred. It is good.

The role of schoolboard makes coordination with society and government achieve the score value an hundred and eleven. The category is good.

At the future time, schoolboard should increase roles of giving supporting, controlling, put together improvement quality of education especially, at basic education subdistrict south Wewewa, in southwest Sumba region.

Key words : Giving Consideration, Supporting Education Activity, To Control, and Mediator

DAFTAR ISI

Judul TAPM	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembaran Pengesahan.....	iii
Lembar Plagiari.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Paradigma Pelayanan Publik.....	17
B. Pengertian Komite Sekolah.....	22
1. Kedudukan Komite Sekolah.....	24
2. Tujuan Komite Sekolah.....	25
3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah.....	26
4. Kajian Sosiologis Peran Komite Sekolah.....	41
5. Kemitraan antara sekolah dan masyarakat.....	61
6. Model Kemitraan	63

C. Kerangka Berpikir	64
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Metode Pendekatan	65
B. Informen Kunci.....	65
C. Definisi Operasional, Indikator dan Skala Penilaian.....	66
D. Fokus Penelitian.....	69
E. Jenis dan Sumber Data.....	71
F. Teknik Pengumpulan Data.....	72
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Profil Kabupaten Sumba Barat Daya.....	74
B. Profil Pendidikan di Sumba Barat Daya.....	74
C. Profil Pendidikan di Kecamatan Wewewa Selatan.....	78
D. Identitas Informen Kunci.....	78
E. Analisis Peran Komite Sekolah Dalam Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dasar Di Kecamatan Wewewa Selatan.....	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan saling *berinteraksi* dengan perkembangan dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam *menentukan* arah maju mundurnya mutu pendidikan. Hal ini bisa dirasakan, ketika sebuah lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikannya itu dengan cara yang benar-benar bagus, maka akan dapat dilihat mutunya. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka hasilnya pun akan biasa-biasa saja

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan

Pendidikan merupakan salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui tingkat komitmen masyarakat, bangsa ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor utama atau penentu bagi masa depan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Tilaar (2001) mengemukakan bahwa, sebagaimana dikutip oleh Mulyasa,(2005) pendidikan nasional dewasa ini dihadapkan pada empat krisis pokok, yakni yang berkaitan dengan mutu, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sedikitnya ada enam masalah pokok yang terkait dengan sistem pendidikan nasional: 1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, 2) pemerataan kesempatan belajar, 3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, 4) status kelembagaan, 5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan 6) sumber daya yang tergolong minim dan belum profesional.

Keenam masalah tersebut merupakan imbas daripada sistem pendidikan Indonesia yang carut-marut dan tidak menentu. Menurunnya akhlak dan moral peserta didik pada dasarnya disebabkan oleh kurikulum

yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, dalam sebuah proses pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, para pendidik secara inklusif harus mengembangkan nilai-nilai ketuhanan (kemanusiaan) dalam berperilaku interaksi dengan individu (peserta didik), keluarga, dan masyarakat. Karena sesungguhnya setiap individu mempunyai hak sepenuhnya untuk dapat hidup bebas (merdeka) dan mendapat perlakuan yang manusiawi pula.

Sebuah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan wawasan baru akan terus berproses seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Konsep dan wawasan baru itu diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu di kaji dan diperjuangkan.

Tanggung jawab pembangunan pada sektor pendidikan khususnya berada bukan saja pada pemerintah tetapi juga berada di tangan masyarakat yang menamakan dirinya organisasi masyarakat sekolah yang disebut POMG (Persatuan Orangtua Murid dan Guru). Organisasi ini sangat tenar, dan terjadi sebelum tahun 1974 aktivitas yang mayoritas dilakukan adalah aktivitas-aktivitas yang menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dapat disebutkan contohnya, membangun rumah guru, di sekitar sekolah dengan maksud agar guru tetap berada di sekolah, dekat di sekolah sehingga berdisiplin tepat waktu melaksanakan tugas pokoknya.

Sesudah tahun 1974, persatuan orangtua murid dan guru berganti nama dengan dikeluarkan keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0293/U/1993 tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan tugasnya membantu menyediakan sumber daya pendidikan seperti guru/tenaga tata usaha yang bekerja di sekolah tetapi honorariumnya terbayar dari dana /uang yang terkumpul dari orangtua siswa. Tenaga kependidikan honorer BP3, hansip BP3, yang bertugas mengangkut siswa/i yang telah lama tinggalkan sekolah atau bolos, meskipun sudah dilakukan home visit oleh wali kelas/gurunya.

Aktivitas-aktivitas yang menunjang penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian partisipasi masyarakat sangat menunjang penyelenggaraan pendidikan Nasional, Keputusan Mendiknas Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atas pra karsa masyarakat, satuan pendidikan, dan atau pemerintah kabupaten/ Kota - . Paradigma lama, yakni Sekolah , Masyarakat /orangtua siswa berdiri sendiri, tak ada jaringan kerja tak ada kolaborasi.

Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peran Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni:

1. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.

2. Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
3. Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
4. Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
5. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
6. Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
7. Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu (Depdiknas, 2001:17).

Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di

antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada Sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di Sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodir keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara Sekolah, Masyarakat dan pemerintah. Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peran serta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah komite sekolah. Keberadaan Komite Sekolah ini telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000- 2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten / Kota, dan Komite Sekolah di

tingkat Satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Dalam Lampiran II: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- d. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Berdasarkan keputusan Mendiknas tersebut, Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan

pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Sekolah, Komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama

Sehubungan dengan peran Komite Sekolah, ada beberapa pakar yang memberi pendapat tentang peran dan optimalisasi pelayanan pendidikan. Menurut Soekanto, (2009:212-213), peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Selanjutnya, Levinson dalam Soekanto(2009:213), peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selain itu ada pendapat ahli yakni Merton dalam Raho(2007:67) mendefinisikan peran sebagai pola tingka laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.sejumlah peran disebut perangkat peran (role-set) yang berarti kelengkapan dari hubungan –hubungan berdasar kan peran yang dimiliki oleh orang karena orang menduduki status sosial khusus.Kemudian Wirutomo (1981:99-101) membeberkan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan

Pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.Peranan didefenisikan sebagai seperangkat harapan –harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.Peranan ditentukan oleh norma-norma daalam masyaraakat ,maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekwerjaan kita,di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan ,yakni:harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang perran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran ,dan kedua ,harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang orang yang berhubungan dengannya adalah menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.Dalam pandangan David Berry ,peranan-peranan dapat dilihat sebagai pola-pola

peranan yang saling berhubungan. Teori peran dapat juga menjadi acuan untuk menerangkan model dan kualitas hubungan antar manusia. Menurut teori peran, dalam pergaulan sosial sudah ada scenario atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat. Lebih lanjut menurut teori ini jika seorang mematuhi scenario, maka hidupnya akan harmonis. Namun, menurut John Wahlke, mendeskripsikan peranan institusi secara behavioral, dimana model teori peran menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Teori peran (role Theory) mendefinisikan "Peran" atau "role" sebagai "The boundaries and sets of expectation applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization's boundaries." (Banton, 1965; Katz & Kahn, 1966 dalam Bauer (2003:55) Teori ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Selain itu, Robbins (2001:227) mendefinisikan peran sebagai "a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit". Selanjutnya, Dougherty & Prichard (1985) DALAM Bauer (2003:56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Ditinjau dari perilaku organisasi, peran itu merupakan salah satu komponen dari system sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum "peran" dapat didefinisikan sebagai

“expectation about appropriate behavior in a job position(leader,subordinate)”Ada dua jenis perilaku yang yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception* .Yaitu,Persepsi seseorang mengenai cara orang itudiharapkan berlaku ; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut.(2) *role expectation* ;yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu .Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi ,akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal indentitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja.Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987:197) menyebutkan lima aspek penting dari peran,yakni

1. Peran itu bersifat inpersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya,bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja,(task behavior)-yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu,sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama—seseorang yang melakukan suatu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Ketika menjalankan peran ini,sekaligus melaksanakan fungsi control dan fungsi penengah.Fungsi control dan fungsi penengah ,adalah dua peran yang yang dilakukan Komite

organisasi masyarakat' yang dibentuk berdasarkan kemauan bersama di luar birokrasi pemerintahan.

Sedangkan optimalisasi pelayanan merupakan merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah service dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Ciptono, berarti "setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu" (Ciptono, 2004:6). Dalam konteks pendidikan, tugas dan tanggung jawab dalam lembaga pendidikan, terutama untuk pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga dalam konteks pelayanan publik.

Pelayanan publik pada hakekatnya merupakan pelayanan prima. Ia memiliki suatu standar yang dapat memuaskan kelompok sasaran. Hal ini merupakan standar umum yang ditetapkan di berbagai organisasi seperti, lembaga, badan usaha, yayasan, pemerintah, termasuk komite sekolah yang bertanggungjawab dalam optimalisasi pelayanan pendidikan di sekolah.

Berdasarkan pendapat para pakar, maka batasan pengertian tentang dan optimalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran

didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, M, 1998 : 286). Sedangkan optimalisasi pelayanan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu” (Ciptono, 2004:6).

Berkaitan dengan peran Komite Sekolah dalam Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dasar, telah dikaji atau diteliti oleh Indah Suci Purwaningsih yang meneliti tentang Peranan Komite Sekolah Sebagai Mediator Antara Pihak Sekolah dengan Wali Murid dan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP N 3 Bonang Demak. Pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tujuan penelitiannya untuk mengetahui peranan komite sekolah sebagai mediator antara pihak sekolah dan wali murid dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hasil temuan menunjukkan bahwa Komite Sekolah tidak optimal menjalankan peran sebagai mediator karena wali murid dan masyarakat kurang mengetahui fungsi, tujuan dan peran Komite Sekolah terutama sebagai mediator.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji secara menyeluruh tentang peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung pengontrol dan mediator. Tujuannya supaya

melihat secara menyeluruh peran Komite Sekolah dalam Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dasar tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu” (Ciptono, 2004:6).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam memberi pertimbangan terhadap peningkatan mutu pelayanan pendidikan di satuan pendidikan SD / SMP di Kecamatan Wewewa Selatan ?
2. Bagaimana peran Komite Sekolah sebagai pendukung dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan SD /SMP di Kecamatan Wewewa Selatan ?
3. Bagaimana peran Komite Sekolah sebagai pengontrol dalam peningkatan pelayanan di Satuan Pendidikan SD / SMP di Kecamatan Wewewa Selatan ?
4. Bagaimana peran Komite Sekolah sebagai mediator peningkatan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan SD / SMP di Kecamatan Wewewa Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Komite Sekolah dalam memberi pertimbangan terhadap peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang mencakupi Satuan Pendidikan SD / SMP di Kecamatan Wewewa Selatan
2. Untuk menganalisa peran Komite Sekolah sebagai pendukung dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan Program pendidikan Dasar di satuan pendidikan SD /SMP di Kecamatan Wewewa Selatan
3. Untuk menganalisa peran Komite Sekolah sebagai pengontrol dalam peningkatan pelayanan di satuan pendidikan SD / SMP di Kecamatan Wewewa Selatan
4. Untuk menganalisa peran Komite Sekolah sebagai mediator peningkatan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan SD / SMP di Kecamatan Wewewa Selatan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritik yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang berhubungan dengan Peran Komite Sekolah dalam optimalisasi pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Menjadikan masukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis yakni agar Komite Sekolah memahami peran dan fungsinya demi peningkatan kemampuan sebagai Mitra Sekolah. Sekolah juga mampu bekerjasama mengelola Sekolah dengan baik.

3. Manfaat akademik yaitu

- a. Menyediakan data dan informasi yang berguna bagi para peneliti dan pemerhati pendidikan yang ingin mengetahui lebih jauh atau mungkin melakukan penelitian yang mempunyai korelasi dengan masalah penerapan strategi pemberdayaan masyarakat melalui Komite Sekolah
- b. Sebagai masukan atau referensi untuk merancang kebijakan baru yang inovatif berkenaan dengan pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah yang di dukung oleh peran serta Komite Sekolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Paradigma Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Ciptono, berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu” (Ciptono, 2004:6). Dalam konteks pendidikan, tugas dan tanggung jawab dalam lembaga pendidikan, terutama untuk pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga dalam konteks pelayanan publik.

Pelayanan publik pada hakekatnya merupakan pelayanan prima. Ia memiliki suatu standar yang dapat memuaskan kelompok sasaran. Hal ini merupakan standar umum yang ditetapkan di berbagai organisasi seperti, lembaga, badan usaha, yayasan, pemerintah, termasuk komite sekolah yang bertanggungjawab dalam optimalisasi pelayanan pendidikan di sekolah.

Letak keprimaan sebuah pelayanan sesungguhnya didasarkan pada beberapa kriteria seperti mutu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang bersangkutan, efektivitas sistem dan tata laksana pelayanan serta tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan

kesejahteraan umum (modul pelatihan departemen dalam negeri tentang pelayanan prima dan kelembagaan pelayanan terpadu satu atap, 2003)

1. Kualitas Pelayanan

Makna atas konsep kualitas telah diberikan oleh banyak pakar dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Goes dan Davis yang dikutip oleh Ciptono mengemukakan bahwa kualitas diartikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. (Ciptono, 2004:51). Ciptono juga mengungkapkan bahwa kualitas adalah standar yang harus dicapai oleh seseorang atau lembaga mengenai kualitas sumber Daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja manusia (Triguno, 1997:96).

Lebih rinci Ciptono melakukan evaluasi dari definisi kualitas. Kemudian Ciptono menarik tujuh definisi yang dikemukakan terhadap konsep kualitas yakni: Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan

- a. Kecocokan untuk pemakaian
- b. Perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan
- c. Bebas dari kerusakan atau cacat.
- d. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat.
- e. Melakukan segala sesuatu secara benar sejak awal
- f. Sesuatu yang biasa membahagiakan pelanggan

Dari pengertian tersebut selain kualitas menunjuk pada pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu, kualitas juga mempunyai pengertian sebagai upaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan terus menerus.

Sedangkan Lukman mengartikan kualitas sebagai janji pelayanan agar yang dilayani itu merasa diuntungkan (Lukman 2000:11). Itu berarti pelanggan merasa puas karena pelayanan yang diberikan.

Pelayanan yang berkualitas menurut Osborne (1995) antara lain memiliki ciri-ciri seperti; tidak prosedural (birokratis), terdistribusi dan terdesentralisasi serta berorientasi kepada pelanggan. Sinambela,dkk (2006) mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari :

1. **Transparansi**, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disediakan secara memadai serta mudah dimengerti/.
2. **Akuntabilitas**, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
3. **Kondisional** yakni pelayanan yang sesuai kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas,
4. **Partisipatif** yaitu pelayanan yang mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan-harapan
5. **Kesamaan hak** yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi tanpa membedakan manusia.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Menurut Zeithaml dan Farmer dalam Warella (2004) menyebut tiga karakteristik utama tentang pelayanan yaitu:

1. *Intangibility* yakni pelayanan yang bersifat *performance* dan hasil pengalaman,
2. *Heteroginity* yakni pelanggan dengan pelayanan yang sama memperoleh prioritas.
3. *Inseparability* yakni antara pemberi pelayanan dan penerima tak terpisahkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau lembaga adalah penting dan bermanfaat baik bagi organisasi atau instansi yang bersangkutan maupun bagi penerima. Itu berarti pelayanan berorientasi kepada masyarakat dan hal itu disebut sebagai pelayanan prima.

Kualitas sebuah pelayanan tergantung pada tingkat kepuasan yang dilayani itu berarti kinerja pelayanan dapat dikatakan berkualitas secara eksternal. Artinya penerima pelayanan mengalami kepuasan.

Berkaitan dengan kualitas pelayanan, Zeithaml (1990:21-22) yang mengatakan bahwa tolok ukur pelayanan dapat dilihat pada 10 dimensi yaitu:

- a. *Tangible*, terdiri dari fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi
- b. *Reliability*, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat
- c. *Responsiveness*, kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan
- d. *Competence*, tuntutan dimiliki pengetahuan dan ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan
- e. *Courtesy*, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen, serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi
- f. *Credibility*, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat
- g. *Security*, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan resiko
- h. *Acces*, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan
- i. *Communications*, kemauan memberi layanan untuk mendengarkan suara keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat
- j. *Understanding the Customer*, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan

B. Pengertian Komite Sekolah

Menurut Faisal (1998 : 67) hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu: (1) sekolah sebagai patner dari masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, dan (2) sekolah sebagai produser yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Untuk itu, Sekolah dan masyarakat harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan disamping tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi, dan bupaten/kota.

Dengan kata lain, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten / Kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep Partisipasi Berbasis Masyarakat (*community-based participation*) dan Manajemen Berbasis Sekolah (*school-based management*) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau *stakeholder* pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau *stakeholder* lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan. Supaya tidak terjadi tumpang tindih beban dan tanggung jawab di antara *stakeholder* pendidikan, maka diperlukan suatu lembaga yang independen, demokratis, transparan yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewedahi peran dan tanggung jawab serta wewenang yang seimbang dan proporsional antara sekolah, wali murid

dan masyarakat serta *stakeholder* lainnya, maka untuk itu dibentuklah komite sekolah. Annisa (2002 : 46) Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Peran Komite Sekolah seperti disebutkan Annisa bahwa Komite Sekolah memiliki peran penting. Menurutnya bahwa: Komite Sekolah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

Komite Sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga non profit dan nonpolitis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Komite sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa. Anggota Komite Sekolah juga disebutkan sekurang-kurangnya berjumlah sembilan. Anggota komite Sekolah dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah tiga orang. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah biasanya ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART). Untuk penamaan badan

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, majelis madrasah, majelis sekolah, komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama. Sebelum dibentuk Komite Sekolah, dikenal adanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di tiap-tiap sekolah dan Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG).

1. Kedudukan Komite Sekolah

Menurut Sukirno sekolah sebagai sebuah lembaga memiliki mitra. Menurutnya, kedudukan Komite Sekolah adalah sebagai lembaga mandiri atau organisasi diluar struktur organisasi sekolah yang lazim disebut organisasi nonstruktural, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sekolah sebagai mitra kerja sekolah (Sukirno : 2006 :62)

Komite sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah), baik madrasah negeri maupun swasta. Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki penyebaran lokasi dan beragam. Ada madrasah tunggal, dan ada pula beberapa madrasah yang menyatu dalam satu kompleks. Oleh karena itu menurut Khaerudin (2007 : 249) Komite Sekolah dapat dibentuk beberapa alternatif sebagai berikut:

- a. Komite Sekolah/madrasah yang dibentuk di satuan pendidikan.
- b. Terdapat beberapa sekolah pada satu lokasi atau beberapa sekolah yang berbeda jenjang tetapi berada pada satu lokasi yang berdekatan, atau beberapa

madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk koordinator Komite Sekolah.

2. Tujuan Komite Sekolah

Lebih lanjut Sukirno menjelaskan bahwa bahwa dibentuknya Komite Sekolah bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi orang tua/wali siswa dan tokoh masyarakat sebagai anggota komite sekolah dalam membantu keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan (Sukirno : 2006 :65)

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif bersama para stakeholder pendidikan di wilayah di mana sekolah berada. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Hasbullah : 2006 :90)

Dengan demikian tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah untuk mewadahi partisipasi para *stakeholder* agar turut serta dalam operasional manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proposional, sehingga Komite Sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan tak terkecuali mutu pendidikan agama Islam. Disamping itu, badan ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar.

Keberadaan Komite Sekolah/madrasah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah/madrasah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Menurut Hasbullah (2006 : 91) bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih bersifat slogan dan

masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan Komite Sekolah atau Komite Madrasah, yang berperan sebagai berikut:

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- c. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka Hasbullah mengemukakan peran Komite sebagai berikut bahwa keberadaan Komite Sekolah berperan sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- d. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Hasbullah : 2006 : 93)

Komite Sekolah mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan operasional komite sekolah, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai:
 - 1) Kebijakan pendidikan;
 - 2) Program Pendidikan;
 - 3) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - 4) Kriteria kinerja satuan;
 - 5) Kriteria tenaga kependidikan;
 - 6) Kriteria fasilitas pendidikan

- b. Peran Komite Sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*),
indicator kinerjanya yaitu:
- 1) Mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan;
 - 2) Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan;
 - 3) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan;
 - 4) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap
 - 5) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu;
 - 6) Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Peran Komite Sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*)
indicator kinerjanya yaitu:
- 1) Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan;
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan pendidikan;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan.
- d. Peran Komite Sekolah sebagai mediator, indikator kinerjanya yaitu:
- 1) Melakukan kerja sama dengan masyarakat;
 - 2) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - 3) Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Sementara itu, untuk menjalankan perannya, komite sekolah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 2) Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga pendidikan;
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan;
 - f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan *akuntabilitas* sebagai berikut:

- 1) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program Sekolah.
- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Adapun secara rinci berdasarkan paparan di atas dapat kita paparkan tugas dan fungsi komite sekolah adalah sebagai berikut

- 1) Menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan program yang ditetapkan.
- 2) Bersama dengan sekolah/madrasah merumuskan dan menetapkan visi dan misi.
- 3) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah/madrasah.
- 4) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun rencana strategi pengembangan sekolah/madrasah.

- 5) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun dan menetapkan rencana program tahunan sekolah termasuk dalam penyusunan dan penetapan RAPBS
- 6) Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa honorium yang diperoleh dari masyarakat kepada kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan sekolah/madrasah.
- 7) Bersama-sama dengan sekolah/madrasah mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik yang bersifat akademis (ujian semester, UAN, maupun yang bersifat non-akademis (keagamaan, olah raga, seni, dan lain sebagainya).
- 8) Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
- 9) Mengelola kontribusi masyarakat berupa non-material (tenaga, pikiran, yang ditujukan kepada peningkatan kualitas pelayanan sekolah/madrasah.
- 10) Mengevaluasi program sekolah/madrasah secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dengan pihak sekolah/madrasah, meliputi pengawasan penggunaan sarana dan prasarana, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.
- 11) Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak sekolah/madrasah (termasuk juga dengan melibatkan masyarakat dan orang tua murid).

- 12) Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara terstandar nasional maupun lokal.
- 13) Memberikan motivasi, penghargaan (baik yang berupa materi maupun non-materi) kepada tenaga kependidikan atau kepada seseorang yang berjasa kepada sekolah/madrasah secara proporsional.
- 14) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar (sekolah/madrasah) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di sekolah/ madrasah yang bersangkutan.
- 15) Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah/ madrasah yang bersangkutan.
- 16) Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah/madrasah.
- 17) Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah/madrasah dan masyarakat.

Selain peran yang disebutkan diatas, peran nyata yang dilaksanakan Komite Sekolah adalah sebagai mitra atau *partner* bagi pemerintah daerah atau sekolah. Badan ini memiliki peran sebatas memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan sekolah, serta memberikan dukungan, kontrol, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

Peran Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Di samping itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dan melakukan evaluasi.

Maka dalam upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama Islam, orang tua dan masyarakat mempunyai potensi signifikan dalam berperan aktif. Antara lain orang tua turut belajar kaitannya dengan birokrasi kependidikan skala kecil dalam satuan pendidikan (sekolah), mendorong aktif kegiatan di sekolah, menciptakan situasi keakraban yaitu dengan diskusi di rumah, dan juga orang tua perlu mengetahui perkembangan anaknya di sekolah serta turut serta dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.

Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan; komite sekolah dalam fungsinya sebagai badan pertimbangan atau badan penasehat bagi sekolah dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya pendidikan antara lain berperan mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat

yang dapat diperbantukan di sekolah. Indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Fungsi Manajemen Pendidikan , mencakup perencanaan sekolah dengan indikator kerjanya;
- 2) Mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat
- 2) Memberi masukan untuk penyusunan RABS
- 3) Menyelenggarakan rapat RABS (sekolah , orangtua siswa dan masyarakat)
- 4) Memberikan pertimbangan perubahan RABS
- 5) Ikut mengesahkan RABS bersama kepala sekolah

Selain itu fungsi manajemen pendidikan mencakup pelaksanaan program kurikulum, proses belajar mengajar ,dan penilaian dengan indikator kerjanya;

- 1) Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah,
- 2) Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru. Dan akhirnya mencakup pengelolaan sumber daya pendidikan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana , anggaran dengan indikator kerjanya.
- 3) Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat.
- 4) Memberi pertimbangan tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah.

- a. Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang diperbantukan di sekolah.
- b. Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.

2) Komite Sekolah sebagai badan pendukung indikator kinerjanya. Komite Sekolah sebagai badan pendukung adalah:

Fungsi Manajemen Pendidikan :

- a. Pengelolaan sumber daya dengan indikatornya.
- b. Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah.
- c. Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di Sekolah.
- d. Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di Sekolah.

Pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator kinerjanya :

- a. Memantau kondisi sarana dan prasarana dengan indikator kinerjanya.
- b. Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana di sekolah.
- c. Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana sekolah.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah.

Pengelolaan anggaran dengan indikator kinerjanya

- a. Memantau kondisi anggaran dengan indikator kinerjanya.

- b. Mobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah.
 - c. Mengkoordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan sekolah.
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.
 - e. Komite Sekolah sebagai badan pengontrol.
- 3) Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan pengontrol sebagai berikut :
- a. Mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah
 - 1) Mengontrol pengambilan keputusan di sekolah
 - 2) Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah
 - 3) Pengawasan terhadap kualitas perencanaan di sekolah
 - 4) Pengawasan terhadap kualitas program di sekolah
 - b. Memantau pelaksanaan program sekolah
 - 1) Memantau organisasi sekolah
 - 2) Memantau penjadwalan program di sekolah
 - 3) Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program di sekolah
 - 4) Memantau partisipasi stakeholder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah
 - c. Memantau output pendidikan
 - 1) Memantau hasil ujian akhir
 - 2) Memantau angka partisipasi sekolah(APS)

3) Memantau angka mengulang di sekolah

4) Memantau angka bertahan di sekolah

Komite Sekolah sebagai Mediator/penghubung Komite Sekolah sehingga berbagai Indikator dalam pelaksanaan program sekolah, sehingga berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah dapat akuntabel kepada masyarakat secara keseluruhan indikator kinerja komite sekolah dalam perannya sebagai badan penghubung sebagai berikut ;

a. Perencanaan dengan indikator kinerjanya

1. Menjadi penghubung antara Komite Sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, komite sekolah dengan dewan pendidikan.
2. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan.
3. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada Sekolah.

b. Pelaksanaan program

1. Mensosialisasikan kebijakan program Sekolah kepada masyarakat.
2. Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap Sekolah.
3. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program Sekolah.

4. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap Sekolah.

c. Pengelolaan sumber daya pendidikan

1. Mengidentifikasi kondisi sumber daya di Sekolah.
2. Mengidentifikasi sumber daya masyarakat untuk sekolah.
3. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat.

Jika Komite Sekolah sudah dapat melaksanakan keempat perannya itu dengan baik, maka diasumsikan bahwa komite sekolah dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan nasional ; karena itu, kiprah komite sekolah juga perlu menentukan berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan Nasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat . indikator yang dapat dimonitor oleh Komite Sekolah di kelompokkan dalam 3 (tiga) prioritas ;

1. Mutu dan relevansi pendidikan
 - a. Peningkatan persentase lulusan terhadap jumlah murid tingkat akhir yang mengikuti ujian.
 - b. Pendayagunaan sarana prasarana belajar yang lebih optimal di sekolah-sekolah (seperti buku pelajaran ,perpustakaan, alat pelajaran, media pendidikan dan pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar).

- c. Peningkatan kualitas guru yang diukur dari rata-rata tingkat pendidikan guru dan jumlah penataran yang diikuti.
 - d. Prosentase siswa pendidikan pra Sekolah terhadap jumlah usia pra Sekolah.
2. Indikator pemerataan dan perluasan
- a. Peningkatan angka partisipasi kasar (APK) yaitu persentase jumlah murid pada suatu sekolah yang berkaitan baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa.
 - b. Angka partisipasi murni (APM) yaitu persentasi jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada salah satu sekolah yang bersangkutan baik secara agregat maupun karakteristik siswa.
 - c. Angka partisipasi sekolah (APS) yaitu jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang terpresentasikan pada beberapa sekolah baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa.
 - d. Jumlah penerima beasiswa pada salah satu sekolah atau salah satu daerah tertentu, dengan tanpa membedakan beberapa variabel karakteristik siswa seperti jenis kelamin, daerah, status sosial ekonomi dan sejenisnya.
 - e. Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan baik bersumber dari pemerintah pusat , pemerintah daerah dan dari masyarakat.

3. Indikator Manajemen pendidikan

- a. Besarnya (kenaikan) anggaran pendidikan sekolah dan daerah otonom yang diperoleh dari sumber-sumber pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk sumber lain dari dunia usaha.
- b. Kemampuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang diperoleh dari masyarakat.
- c. Kemampuan pengadaan sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan) yang diperoleh dari sumber masyarakat.
- d. Perubahan dalam tingkat efisiensi pendayagunaan tenaga guru di sekolah yang diukur dengan turn over.
- e. Penurunan persentase putus sekolah rata-rata pada suatu satuan pendidikan.
- f. Peningkatan angka melanjutkan sekolah dari suatu sekolah ke sekolah lain.

4. Kajian Sosiologis tentang Peran Komite Sekolah

Partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan peran serta atau keterlibatan seseorang baik sebagai perorangan atau kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Pendekatan yang dipakai dalam partisipasi masyarakat ini adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan , termasuk proses pembangunan pendidikan, sebagaimana diungkapkan conyers agar di capai hasil pembangunan bidang pendidikan

yang berkelanjutan perlu diambil pendekatan dengan melibatkan masyarakat , pada intinya keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk pendidikan tergantung keterlibatan aktif masyarakat.

Parent/community involvement, partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai suatu kerja sama (*partnership*) yang erat dan saling menguntungkan antara sekolah dengan masyarakat , kerja sama dengan masyarakat ini dibagi dua :

1. *Partnership* (kerjasama) antara sekolah dengan orangtua murid
2. *Partnership* (kerja sama) antara sekolah dengan masyarakat luar kerja sama dengan orangtua murid untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan cara sebagai berikut
 - a. Mengajak anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas yang mendidik di rumah, termasuk membantu memeriksa pekerjaan rumah dan mengajarkan beberapa hal yang belum di mengerti oleh anak-anak
 - b. Mengawasi anak-anak saat di luar sekolah (bagaimana anak-anak menggunakan waktunya di luar rumah)
 - c. Berkomunikasi mengenai kegiatan anak-anak saat di sekolah dan menunjukkan perhatian tentang segala hal yang mereka pelajari di sekolah

- d. Menghadiri kegiatan-kegiatan sekolah , pertemuan dengan orangtua-guru, menawarkan diri untuk terlibat dalam acara-acara di sekolah

Kerja sama dengan masyarakat umum merupakan bentuk partnership antara sekolah dengan masyarakat luar yang memiliki banyak sumber daya yang sangat bermanfaat bagi perkembangan sekolah. Biasanya kerjasama ini dalam bentuk :

1. Orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tertentu yang menawarkan diri untuk menyumbangkan waktunya di sekolah.
2. Organisasi-organisasi yang menawarkan berbagai kesempatan berharga untuk perkembangan sekolah.
3. Bisnis yang secara rutin memberikan informasi yang berkaitan dengan karir dan pekerjaan (membantu membuka lapangan kerja).
4. Agen-agen /pekerja sosial yang selaku meluangkan waktu untuk membantu sekolah.

Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan satu bentuk desentralisasi yang langsung sampai keujung tombak pendidikan di lapangan ; oleh karena itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu melalui dewan pendidikan maupun komite sekolah sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di dalam masyarakat. Ada berbagai bentuk partisipasi masyarakat misalnya melalui komite sekolah terhadap sekolah antara lain ;

1. Membantu guru kepala sekolah, dan siswa di dalam kelas maupun di luar kelas
2. Menghadiri pertemuan-pertemuan dan kegiatan di sekolah
3. Membantu dalam menentukan visi dan program sekolah dan
4. Terlibat dalam perencanaan dan evaluasi kurikulum serta kebijakan sekolah

Bentuk – bentuk lain dari partisipasi masyarakat melalui komite sekolah terhadap sekolah adalah :

- a. Partisipasi pada kelompok perencanaan dan manajemen. Sekolah serta kelompok pengembangan sekolah.
- b. Berpartisipasi dalam pelaksanaan pertemuan dan loka karya bagi orang tua guna membantu mereka dalam proses belajar mengajar untuk kepentingan dan keberhasilan anak-anak mereka sendiri.
- c. Berpartisipasi dalam aktivitas komite sekolah.
- d. Mendapat posisi khusus untuk membantu sekolah dalam program pengajaran siswa di sekolah maupun di rumah.

Partisipasi orang tua terhadap sekolah merupakan hal penting dalam peningkatan mutu sekolah, dalam peningkatan mutu sekolah kaitan dengan , para orang tua diharapkan mempunyai kesepakatan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan sekolah dan peran-peran yang sifatnya dukungan seperti mengarahkan anak-anaknya agar belajar dengan disiplin.

Komite Sekolah diharapkan dapat menentukan konsep kependidikan yang tinggi terhadap anak-anaknya , memberikan pengertian kepada anak

tentang pentingnya sekolah serta menaruh minat terhadap aktivitas anak di sekolah.

Pada sisi lain, partisipasi masyarakat juga melalui Komite Sekolah terhadap sekolah dalam berbagai bentuk seperti :

1. Berpartisipasi dalam struktur organisasi sekolah sebagai pengarah.
2. Berpartisipasi dalam program-program sekolah.
3. Berpartisipasi dalam program pelatihan yang diadakan sekolah mengenai cara-cara memberi bantuan yang maksimal kepada peserta didik mereka sehingga komite sekolah mempunyai keahlian dalam membantu peserta didik dan mempunyai kemampuan akademis sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik.

Secara umum disimpulkan beberapa aktivitas komite sekolah berbagai wujud partisipasi masyarakat terhadap sekolah antara lain ;

1. Menciptakan komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua.
2. Sebagai fasilitator dalam pembelajaran anak-anaknya.
3. Ada rasa memiliki terhadap sekolah.
4. Dukungan terhadap usaha-usaha peningkatn akademis sekolah.
5. Ikut serta dalam pengambilan keputusan sekolah.

Partisipasi masyarakat melalui komite sekolah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi sembilan (9) indikator yaitu :

- a. Partisipasi dalam menentukan kebijakan dan program sekolah.

- b. Partisipasi dalam ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program sekolah.
- c. Partisipasi dalam pertemuan rutin di sekolah.
- d. Partisipasi dalam kegiatan ekstra kurikuler.
- e. Partisipasi dalam pengawasan mutu sekolah.
- f. Partisipasi dalam pertemuan komite sekolah.
- g. Partisipasi dalam membiayai pendidikan.
- h. Partisipasi dalam mengembangkan iklim sekolah.
- i. Partisipasi dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah.

Komite sekolah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru-guru dan murid untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif.

Sebagai contoh dalam masalah sumber dana Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) pun harus disahkan atas dasar persetujuan bersama antara pihak sekolah dan masyarakat dalam hal ini komite sekolah yang di tandatangani oleh kepala sekolah dan ketua komite sekolah, sehingga menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) pendidikan di tingkat sekolah yang resmi.

Komite sekolah berfungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Organisasi Komite Sekolah terdiri atas:

- a. Unsur masyarakat dapat berasal dari
 1. Orang tua / wali peserta didik
 2. Tokoh masyarakat
 3. Tokoh Pendidikan
 4. Dunia usaha/Industri
 5. Organisasi profesi tenaga kependidikan
 6. Wakil alumni
 7. Wakil peserta didik
 8. Unsur dewan guru, Yayasan/lembaga penyelenggaraan pendidikan, Badan pertimbangan desa, dapat dilibatkan menjadi anggota komite sekolah (maksimal 3 orang)
- Anggota komite sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang

Kepengurusan Komite Sekolah meliputi:

- a. **Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas;**
 1. **Ketua**
 2. **Sekretaris**
 3. **Bendahara**
- b. **Pengurus di pilih dari dan oleh anggota**
- c. **Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan**

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) berisikan:

- a. **Komite Sekolah wajib memiliki AD dan ART**
- b. **Anggaran dasar sebagaimana di maksud sekurang-kurangnya memuat**
 1. **Nama dan tempat kedudukan**
 2. **Dasar, tujuan dan kegiatan**
 3. **Keanggotaan dan kepengurusan**
 4. **Keuangan**
 5. **Mekanisme kerja dan rapat-rapat**
 6. **Perubahan AD dan ART serta pembubaran organisasi**

Pembentukan Komite Sekolah

1. **Prinsip Pembentukan**

Pembentukan komite sekolah menganut prinsip-prinsip:

- a. **Transparan , akuntabel dan demokratis**
- b. **Merupakan mitra satuan pendidikan**

2. Mekanisme Pembentukan

a. Pembentukan panitia persiapan

1) Masyarakat dan /atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan panitia berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan. Seperti guru kepala satuan pendidikan penyelenggara pendidikan pemerhati pendidikan (LSM) peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri dan orangtua peserta didik.

2) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan komite sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat termasuk pengurus /anggota BP 3/ majelis sekolah , Komite sekolah menurut keputusan ini

b. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat

c. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat

d. Menyusun nama-nama anggota terpilih

e. Mengumumkan nama-nama calon anggota terpilih

f. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah

g. Menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada kepala satuan pendidikan

- 3) Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk
- 4) Penetapan pembentukan komite sekolah.

Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan dan selanjutnya di atur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga (ART).

Menurut Nasichin, SH , Direktur Pendidikan Luar Biasa Dirjend Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas mengatakan Komite/Dewan Sekolah berperan :

- (1) Dalam pengguliran model pendekatan MBS dalam otonomi Pendidikan,
- (2) Menjadi mitra dalam kepemimpinan kepala sekolah yang padat tugas dan tanggungjawabnya terhadap pengelolaan dan pengembangan pendidikan di era otonomi daerah,
- (3) Sebagai penyaring (*filter*) aspirasi masyarakat yang secara okomodatif dapat dirumuskan dalam bentuk program yang realitis,
- (4) Sebagai badan pengawasan terhadap perencanaan konsep dan penyelenggaraan program pendidikan secara obyektif dan berkesinambungan
- (5) Dewan Sekolah menampung aspirasi, ide-ide, tuntutan, dan kebutuhan yang diajukan oleh siswa, masyarakat, pakar, guru,

pemerintah daerah, dan orang tua terhadap upaya peningkatan mutu belajar siswa dan mutu pendidikan.

Selanjutnya dewan sekolah berupaya mencari solusi dan menyampaikan usul-usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah. Semua itu bertujuan meningkatkan mutu pendidikan sekolah di Kabupaten / Kota baik yang menyangkut program kurikulum , Profesionalisasi Kepala Sekolah dan Guru , atau peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan yang dibutuhkan di sekolah. (Nasichin, 2001 : 5)

Berdasarkan pendapat para ahli dan diimplementasikan dalam partisipasi pendidikan nasional, maka peran komite sekolah adalah

- (1) Pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan,
- (2) Fungsi pengendalian dan akuntabilitas publik,
- (3) Fungsi pendukung (Support),
- (4) Fungsi penghubung (mediator) antara sekolah, pemerintah dan masyarakat.

Sedangkan tugas dari Komite sekolah adalah :

- a) Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai program yang ditetapkan bersama sekolah,
- b) Menetapkan visi – Misi
- c) Menyusun standar Pembelajaran,
- d) Menyusun rencana strategis pengembangan sekolah,
- e) Menyusun dan menetapkan rencana program tahunan serta mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan,

- f) Membahas dan menetapkan tambahan kesejahteraan,
- g) Menghimpun dan menggali serta mengelola sumber dana serta kontribusi lainnya baik material maupun non material dari masyarakat.

Berkaitan dengan pendidikan dasar, maka yang termasuk dalam lingkup ini adalah salah satu penyelenggara pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini, Pendidikan Menengah dan Pendidikan tinggi. penyelenggaraan pendidikan dasar pada umumnya adalah

Membangun landasan bagi perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur, berilmu, cakap kritis, kreatif dan inovatif, sehat, mandiri, dan mandiri dan toleran, peka sosial, demokratis serta bertanggung jawab, maka diluncurkan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, yang tujuannya:

- (1) Memberikan informasi tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun kepada seluruh masyarakat, terutama kepada para pengelola pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, baik dipusat maupun di daerah,
- (2) Mewujudkan kesamaan pandangan , pemahaman ataupun persepsi dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun,
- (3). Mengoptimalkan pelayanan pendidikan dasar bagi anak usia 13-15 tahun.

Di dalam buku penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pendidikan Dasar adalah Pendidikan yang lamanya Sembilan Tahun, diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di sekolah dasar atau satuan pendidikan yang sederajat dan 3 (tiga) tahun sekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
- (2) Wajib belajar adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang berumur 7 (tujuh) tahun atau lebih untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat.
- (3) Angka partisipasi kasar (APK) tingkat sekolah dasar (SD) merupakan perbandingan antara jumlah siswa (SD) semua usia dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dikalikan dengan 100. APK untuk tingkat SLTP adalah merupakan perbandingan antara jumlah siswa (SLTP) semua usia di bagi dengan jumlah penduduk usia 13 -15 tahun dikalikan dengan 100.
- (4) Angka partisipasi murni (APM) tingkat sekolah dasar (SD) merupakan perbandingan antara jumlah siswa (SD) usia 7 – 12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dikalikan 100. APM untuk jumlah siswa (SLTP) usia 13 -15 tahun dibagi dengan jumlah siswa (SLTP) usia 13 -15 tahun dikalikan dengan 100.
- (5) Angka melanjutkan / angka transisi (AM /AT) merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I di SLTP dibagi

dengan jumlah seluruh lulusan SD, pada suatu tahun pelajaran dikalikan dengan 100.

- (6) Angka partisipasi siswa (APS) tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan antara jumlah seluruh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar pada suatu periode di bagi dengan jumlah seluruh penduduk pada periode yang sama dikalikan dengan 100.
- (7) Angka putus sekolah perbandingan peserta didik yang putus sekolah, baik pada program pendidikan 6 tahun di SD maupun pada program pendidikan 3 tahun di SLTP dengan jumlah peserta didik pada kelas yang sama pada suatu periode sebelumnya dikalikan dengan 100.
- (8) Angka mengulang adalah perbandingan antara jumlah peserta didik yang tidak naik kelas dan mempertahankan diri pada kelas yang sama, pada suatu periode sebelumnya.

Sedangkan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan program enam tahun di SD dan yang sederajat dan atau setara terdiri atas (10) sepuluh satuan pendidikan sebagai berikut :

- a) Sekolah Dasar (SD) biasa,
- b) Sekolah Dasar (SD) kecil,
- c) Sekolah Dasar (SD) Pamong,
- d) Sekolah Dasar (SD) Luar biasa,
- e) Sekolah luar biasa,
- f) Sekolah Dasar (SD) terpadu,

- g) Program Layar paket A,
- h) Ujian Persamaan (SD) (U Pers SD),
- i) Madrasah Ibtidaiyah (MI),
- j) Pondok Pesantren (Ponpes).

Sekolah dasar biasa adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun, sekolah dasar biasa memiliki gedung/ tempat belajar rata-rata sebanyak enam ruangan, ruang guru, ruang perpustakaan, kamar mandi/WC serta fasilitas pendidikan lainnya dibangun dengan dana Inpres, terdiri dari dua unit I dan II lengkap dengan perabotnya; serta menggunakan kurikulum yang berlaku Nasional, proses belajar berlangsung pagi atau siang hari. Sekolah dasar biasa dikelompokkan dalam 4 tipe yaitu tipe A, B, C, dan D. Sekolah dasar tipe A, adalah sekurang-kurangnya mempunyai sepuluh kelompok belajar (kelas) terdiri dari enam tingkat dengan jumlah paling sedikit 361 orang. Sekolah dasar tipe B sekolah dasar yang mempunyai enam sampai sembilan kelompok belajar (kelas) dengan jumlah siswa sekurang-kurangnya 181 orang. Sekolah dasar tipe C adalah sekolah dasar yang mempunyai enam kelompok belajar (kelas) dengan jumlah siswa sebanyak 91 sampai 180 orang. Sekolah dasar tipe D adalah sekolah dasar yang mempunyai enam kelompok belajar (kelas) dengan jumlah siswa sebanyak 61 sampai 90 orang.

SD Biasa TIPE A	SD Biasa TIPE B
1 orang Kepala Sekolah	1 Orang Kepala Sekolah
10 orang guru kelas	6 – 9 orang guru kelas
1 orang guru Agama	1 orang guru Agama
1 orang guru olahraga dan kesehatan	1 orang guru olahraga
1 orang tenaga tata usaha	1 orang penjaga/pesuruh sekolah
2 orang pejaga / pesuruh sekolah	Kelas I – VI
Kelas I – VI	Jumlah siswa minimal 181 orang
SD Biasa TIPE C	SD Biasa TIPE D
1 orang Kepala Sekolah	1 Orang Kepala Sekolah yang merangkap sebagai guru kelas
5 orang guru kelas	3 orang guru kelas
1 orang guru Agama yang mengajar di dua sekolah dasar tipe C	1 orang guru Agama yang mengajar di dua sekolah dasar Tipe D
1 orang guru penjas	1 orang guru penjas
1 orang pejaga/pesuruh sekolah	1 orang penjaga/pesuruh sekolah
Jumlah siswa minimal 91 – 180	Jumlah siswa minimal 61 orang sampai 90 orang

- Sekolah Dasar kecil ialah sekolah dasar yang mempunyai siswa sebanyak 10 orang sampai 60 orang SD kecil ini diselenggarakan khususnya untuk daerah terpencil. Seorang kepala sekolah, dua orang guru, dan satu orang guru agama yang mengajar di dua sekolah dasar kecil.

- **Sekolah Dasar Pamong**

SD Pamong adalah bentuk akronim dari Pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua dan guru. Jadi SD pamong adalah Lembaga Pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan anak dengan mengikutsertakan masyarakat, orang tua, guru dan anak didik seperti yang ditetapkan dalam garis-garis besar Hukum Negara.

Ciri Khas Sekolah Dasar Pamong

- Peran serta masyarakat membantu penyediaan tempat belajar
- Peran orang tua mendorong anaknya belajar,
- Guru atau tutor berperan dalam proses mengajar,
- Serta anak sendiri ikut aktif belajar.

SD Pamong diadakan di tempat-tempat dimana terdapat anak usia 7 – 12 tahun yang putus sekolah dan anak yang tidak bersekolah yang umumnya karena faktor sosial ekonomi, tidak dapat datang secara teratur dan belajar SD biasa.

- Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)

Semua siswanya terdiri dari anak cacat, dengan berbagai ketunaan (Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna grahita, dan Tuna daksa) yang pelaksanaannya berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 1982. SDLB didirikan di setiap kabupaten/kota untuk menampung anak usia 7 – 12 tahun yang cacat. Tenaga guru , kepala sekolah , dan pesuruh sekolah diangkat oleh pemerintah.

- Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah luar biasa adalah sekolah untuk anak cacat yang jenjang pendidikannya meliputi tingkat persiapan , tingkat dasar, dan tingkat lanjutan satu sekolah menerima satu jenis ketunaan. Olehnya ada SLB/A untuk tuna netra , SLB/B untuk tuna rungu, SLB/C untuk anak tuna grahita SLB/D untuk anak tuna daksa dan SLB /E untuk anak tuna laras. Kepala sekolah dan gurunya tamatan sekolah guru pendidikan luar biasa.

- Pendidikan adalah Lembaga Pendidikan tingkat sekolah dasar yang siswanya terdiri dari anak usia 7 – 12 tahun yang normal dan cacat yang belajar terpadu pada sekolah dasar umum.

- Program Kejar Paket A

Program kejar paket A dalam arti umum semua jenis usaha pendidikan yang berbentuk kegiatan bekerja dan belajar untuk mengejar ketinggalan yang dilaksanakan dalam bentuk atau wadah kelompok belajar. Kejar paket A memberikan pelayanan Pendidikan kepada anak yang belum pernah memperoleh pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar dan anak putus Sekolah Dasar, terutama di daerah yang berpenduduk sedikit serta sering berpindah-pindah. Kejar paket A diadakan oleh pemerintah bersama masyarakat status kelembagaannya bersifat sementara. Kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di rumah penduduk pada waktu tertentu sesuai dengan waktu yang longgar bagi siswa (penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun , tahun 2002 : 21).

- Ujian Persamaan SD (Upers SD)

Ialah kegiatan menilai tingkat pengetahuan, sebagai dasar pertimbangan menertibkan surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan surat tanda tamat belajar SD dan daftar nilai ujian akhir sekolah di SD. Ujian persamaan SD penyelenggaraan pendidikannya berdasarkan kurikulum SD yang berlaku secara nasional. Ujian

persaman SD dilaksanakan berdasarkan kurikulum SD yang berlaku secara Nasional.

- **Madrasah Ibtidaiyah (MI)**

Adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan selama 6 tahun bagi anak usia 6 tahun samapi 12 tahun berdasarkan PP nomor 28 tahun 1990, madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah sekolah dasar berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan Departemen Agama .

- **Pondok Pesantren**

Ponpres adalah Lembaga Pendidikan dan pusat penyiaran Agama Islam tertua di Indonesia . Lembaga ini diasuh oleh seorang kyai atau yayasan /organisasi dengan sistem asrama. Sistem yang lazim dipergunakan dalam proses belajar mengajarnya , lebih dikenal dengan sistem bandongan /wetonan, dan soragan dengan masa belajar yang disesuaikan jenis dan tingkatan (program) kitab yang diselesaikannya.

Sedangkan Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan program tiga tahun di SLTP dan yang sederajat dan atau setara terdiri atas 11 (Sebelas) satuan Pendidikan sebagai berikut :

- a) Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) biasa
- b) Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) kecil
- c) Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) terbuka
- d) Sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa (SLTP LB)

- e) Sekolah luar biasa (SLB)
- f) Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP , terpadu)
- g) Program kejar paket B
- h) Ujian persamaan SLTP (Upres SLTP)
- i) Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- j) Madrasah Tsanawiyah (MTs) terbuka
- k) Pondok Pesantren (Ponpes)

- Satuan - Satuan Pendidikan

SLTP biasa (SLTP) biasa adalah salah satu bentuk pendidikan Dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan Pendidikan program tiga tahun setelah menyelesaikan program enam tahun (SD).

SLTP biasa + 240 orang siswa

- SLTP kecil memiliki tiga rombongan belajar
- SLTP terbuka mulai dirintis sejak tahun 1979

Dalam rangka usaha meningkatkan pemerataan kesempatan belajar khususnya bagi tamatan SD atau satuan pendidikan sederajat yang tidak berkesempatan mengikuti SLTP biasa. SLTP terbuka menekankan pada prinsip belajar mandiri yaitu cara belajar yang dilakukan sendiri oleh siswa dan membatasi seminimal mungkin bantuan orang lain.

- Indikator Pendidikan Dasar

Tingkat pencapaian pembangunan pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah bersama orang tua dan masyarakat ,

yang meliputi : angka partisipasi, angka kelulusan, angka putus sekolah, angka mengulang, rasio siswa/guru dan guru/sekolah kelayakan mengajar guru, kondisi sarana sekolah dan tingkat mutu pendidikan.

Untuk itu, diperlukan program pendidikan dasar dilaksanakan , antara lain:

- a) Peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar dengan melanjutkan *pembangunan* unit gedung baru (UGS),
- b) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan,
- c) Peningkatan efisiensi pendidikan.

5. Kemitraan Antara Sekolah dan Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2004 : 129) bahwa kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik

Menurut UNAID (2009 : 53) Kemitraan dicirikan oleh adanya persetujuan formal antara mitra dan sector pemerintah, saling berkontribusi dan interaksi dalam mengelola kemitraan. Dalam pengertian sempit *private sector* mengacu pada organisasi bisnis, organisasi non pemerintah dan organisasi – organisasi berbasis agama. Sedangkan istilah *public sector* mengacu pada pemerintah dan lembaga lembaga pemerintah.

Nilufa Akhter Khanom ([www.wbiconpro.com/14\(1\)-Nilufa.pdf](http://www.wbiconpro.com/14(1)-Nilufa.pdf)) mengatakan bahwa kemitraan memiliki beberapa kriteria antara lain a) tujuan bersama dalam arti kemitraan dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai tujuan – tujuan yang disepakati oleh kelompok – kelompok kemitraan. Tujuan tersebut idealnya dikembangkan melalui suatu komunikasi dan negosiasi. b) persetujuan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Ini berarti bahwa terdapat komitmen khusus untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut dan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kekuatan kemitraan. c) aktivitas – aktivitas kemitraan akan mengatasi kelemahan – kelemahan dari setiap mitra, sehingga berbagai keahlian, pengetahuan atau pengalaman sangat diperlukan untuk mengatasi kelemahan – kelemahan. d) actor – actor dalam program kemitraan bias jadi berasal dari masyarakat yang berbeda seperti LSM, pemerintah lokal, kelompok-kelompok peneliti, perusahaan dan pemerintah nasional

Bing Li dan Akintoye (Akintoye et.al 2003:7) mengemukakan bahwa ada beberapa keuntungan kemitraan antara lain a) memperkuat kapasitas asosiasi dan solusi secara terpadu;b) memfasilitasi pendekatan – pendekatan kegiatan kreatif dan inovatif, menarik lebih banyak penawaran untuk terlibat dalam proyek – proyek kerja sama kemitraan,c) mengakses teknologi, pengalaman dan keterampilan baru.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan, maka kemitraan dapat dibentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak atau lebih

- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
- c. Ada kesepakatan
- d. Saling membutuhkan

Selanjutnya menurut Sulistiyani (2004 : 130) tujuan terbentuknya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antara dua pihak antara pihak yang bermitra. Dengan demikian maka kemitraan dapat memberikan keuntungan kepada pihak – pihak yang bermitra dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan. Untuk terjadinya suatu kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat sangat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lainnya.

6. Model Kemitraan

Menurut Sulistiyani (2004 : 130) mengemukakan beberapa model kemitraan antara lain :

- a. Kemitraan Semu; merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih namun tidak sesungguhnya melakukan kerja sama secara seimbang antara satu dengan yang lainnya, bahkan pada satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan.
- b. Kemitraan Mutualistik; merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama – sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan

yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan mencapai tujuan yang optimal.

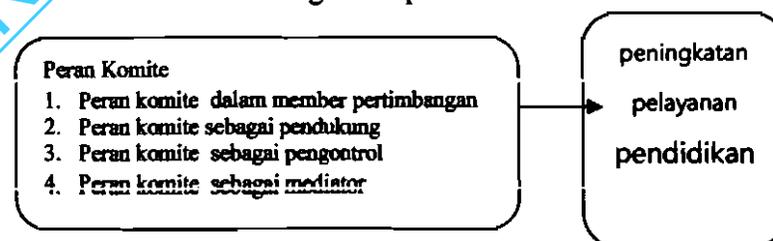
- c. **Kemitraan Konjugasi** ; merupakan kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan paramencium dimana dua paramencium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energy dan kemudian terpisah satu sama yang lain dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri.

Berdasarkan pembagian model kemitraan yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini model yang dinilai sangat cocok dan sesuai dengan kemitraan antara komite dengan sekolah adalah model kemitraan mutualistic

F Kerangka Pikir

Dari uraian di atas tentang kajian pustaka, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Dengan fokus penelitian Peran Komite dalam Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya dan mengacu pada empat peran yaitu memberi pertimbangan, dan memberi dukungan (tenaga, pikiran, uang dan materi lain); mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai mediator antara pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif terhadap masyarakat

B. Informen Kunci

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 48 orang dari 24 sekolah baik Sekolah Dasar maupun SLTP. Setiap sekolah yang mewakili adalah kepala sekolah dan bendahara

2. Sampel

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 28 orang responden.

Metode penarikan sampelnya adalah metode *purposive Sampling*

dimana teknik penarikan sampel untuk tujuan tertentu dengan mengambil anggota informan yang berkompeten dan memahami benar peran komite sekolah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yakni kepala sekolah dan bendahara sekolah.

C. Definisi Operasional, Indikator Dan Skala Penilaian

1. Memberi Pertimbangan

Definisi Operasional

Peran komite sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan

Indikator

Kebijakan pendidikan, Program Pendidikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria tenaga kependidikan.

Skala Penilaian

Sangat Baik : 5

Baik : 4

Cukup Baik : 3

Kurang Baik : 2

Tidak Baik : 1

2. Pendukung

Definisi Operasional

Peran komite sekolah adalah sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di

Satuan Pendidikan

Indikator

Mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan, mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan, mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Skala Penilaian

Sangat Baik : 5

Baik : 4

Cukup Baik : 3

Kurang Baik : 2

Tidak Baik : 1

3. Pengontrol**Definisi Operasional**

Peran Komite Sekolah adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di Satuan Pendidikan

Indikator

Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan, melakukan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan pendidikan, melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan.

Skala Penilaian

Sangat Baik : 5

Baik : 4

Cukup Baik : 3

Kurang Baik : 2

Tidak Baik : 1

4. Sebagai Mediator**Definisi Operasional**

Peran Komite Sekolah adalah sebagai mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Indikator

Melakukan kerja sama dengan masyarakat, menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat

Skala Penilaian

Sangat Baik : 5

Baik : 4

Cukup Baik : 3

Kurang Baik : 2

Tidak Baik : 1

D. Fokus Penelitian

No	Item Pernyataan Peran Komite Sekolah	Klasifikasi				
		SB	B	CB	KB	TB
MEMBERI PERTIMBANGAN						
1	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek kebijakan pendidikan terhadap program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
2	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek program pendidikan terhadap program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
3	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek Rancangan Pendapatan dan Belanja Sekolah terhadap program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
4	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek kriteria tenaga kependidikan terhadap kriteria tenaga kependidikan terhadap program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
MEMBERI DUKUNGAN						
5	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek dorongan orang tua berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan terhadap program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
6	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek penggalangan dana untuk pembiayaan pendidikan dalam program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					

7	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan dalam program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya				
8	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek mendorong komitmen masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya				
SEBAGAI PENGONTROL					
9	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan evaluasi kegiatan terhadap program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya				
10	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya				
11	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan pengawasan terhadap kebijakan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya				
SEBAGAI MEDIATOR					
12	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan kerja sama dengan msyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya				
13	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan kerja sama dengan msyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan program				

	Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
14	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek menampung aspirasi, ide dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
15	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek membangun kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
Keterangan: SB = Sangat Baik B = Baik CB = Cukup Baik KB = Kurang Baik TR = Tidak Baik						

E. Jenis dan sumber data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui pengisian kuisioner yang diberikan pada responden peran komite

2. Data Sekunder

Data yang telah disiapkan oleh Sekolah seperti program kerja, rancangan anggaran dan belanja sekolah, daftar hadir rapat, notulen rapat, laporan kegiatan pengembangan kurikulum

F. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Untuk menjaga obyektivitas dari hasil pengumpulan data, maka peneliti menggunakan metode Triangulasi atau purposive sampling di mana jawaban informan kunci selalu dibandingkan antara informan kunci yang satu dengan yang lainnya baik dari tokoh masyarakat, orang tua siswa, tokoh agama dan pemerhati pendidikan.

Data awal diperoleh melalui:

1. Wawancara, yaitu wawancara terhadap informan kunci dengan mengacu pada pedoman wawancara yang disiapkan untuk merekam data mengenai peran Komite Sekolah dalam Optimalisasi Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan.
2. Studi Dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari berbagai bahan dokumen Komite seperti program kerja Komite, notulen rapat komite, AD dan ART Komite yang menjadi referensi dalam menjalankan program Komite.

G. Teknik Analisis Data

Untuk kepentingan analisis data penulis menggunakan teknik analisis rentang kriteria (Sugiono : 2000 : 76) yaitu :

$$Rk = \frac{n(m)}{m}$$

Keterangan :

- Rk* = Rentang kreteria
n = Jumlah sampel
m = Jumlah alternatif jawaban tiap item

Skema penilaian tiap kriteria dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Penentuan rentang skor terendah dan tertinggi dengan cara mengalikan jumlah n dengan bobot jawaban paling rendah dan paling tinggi, maka didapat rentang terendah 28 dan rentang tertinggi 140
- b. Rentang tiap criteria

$$Rk = \frac{n(m)}{m} = \frac{28(5)}{5} = 28$$

- c. Berdasarkan pendekatan kualitatif, maka peneliti menggunakan rentang kriteria mulai dari tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik dengan penjelasan deskriptif masing-masing kriteria dimaksud.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Sumba Barat Daya

Keadaan geografis, secara astronomis Kabupaten Sumba Barat Daya terletak antara 90 18' - 100 20' Lintang Selatan (LS) dan 1180 55'-1200 23' Bujur Timur (BT). Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki batas-batas pada bagian utara dengan Selat Sumba, bagian Selatan dengan Samudera Indonesia, bagian Barat dengan Samudera Indonesia, dan bagian Timur dengan Kabupaten Sumba Barat. Dari sisi tata wilayah pemerintahan, Kabupaten ini terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kodi, Kodi Utara, Kodi Bangedo, Wewewa Barat, Wewewa Selatan, Wewewa Timur, Wewewa Utara, dan Loura. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki luas daratan mencapai 1.445,32 km². Sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit di mana hampir 50 persen luas wilayahnya memiliki kemiringan 140 - 400.

Keadaan demografis Sumba Barat Daya dilihat dari jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2012 dapat dilihat di bawah ini:

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
Kodi	16,345	16,246	32,591
Kodi Utara	25,244	23,549	48,793
Kodi Bagedo	18,605	17,771	36,376
Wewewa Barat	24,659	23,935	48,594
Wewewa Selatan	10,095	10,179	20,274
Wewewa Timur	28,117	27,529	55,646
Wewewa Utara	6,417	6,749	13,166
Loura	16,672	16,662	33,334
Sumba Barat Daya	146,154	142,620	288,774

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumba Barat Daya (tahun

2012)

Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Wewewa Timur dan secara berturut-turut diikuti oleh kecamatan Kodi Utara, Wewewa Barat, Kodi Bagedo, Loura, Kodi, Wewewa Selatan, dan Wewewa Utara.

Sebaran penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya menurut kecamatan belum tergolong padat. Biasanya kota kabupaten dengan jumlah penduduk terpadat dibandingkan dengan penduduk di wilayah kecamatan lain di luar pusat kota kabupaten. Tetapi yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya justru tidak demikian. Kecamatan dengan penduduk terpadat justru ada di luar pusat pemerintahan kabupaten seperti di kecamatan Kodi (285), Wewewa Barat (265

jiwa/km²), Wewewa Timur (219 jiwa/km²), Kodi Utara (215/km²). Sementara di pusat kota kabupaten (Kecamatan Loura: 168 jiwa/km²), Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 6

Jumlah Penduduk, Luas Daerah, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan 2012

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Daerah Area (Km ²)	Kepadatan Penduduk per Km ²	Kepadatan Penduduk Kecamatan terhadap Luas wilayah Kabupaten	% Penduduk Kecamatan terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten
1	2	3	4	5	6
01. Kodi				22	
02. Kodi Utara	31.682	111,05	285	36	10,90
03. Kodi	52.378	243,82	215	26	18,03
Bangedo	36.958	219,69	168	32	12,72
04. W.Barat	46.174	174,33	265	15	15,90
05. W.Selatan	22.000	174,14	126	38	7,57
06. W. Timur	54.538	249,55	219	8	18,77
07. W. Utara	11.701	63,26	185	24	4,03
08. Loura	35.108	209,48	168		12,08
Sumba Barat					
Daya	290.539	1.445,32	201	201	100,00

Catatan : Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2012

B. Profil Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya

Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2007. Undang-Undang tersebut kemudian dijabarkan lagi dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Barat, Nomor 2 Tahun 2008, tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Berbagai kebijakan pokok pemerintahan telah dirumuskan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merumuskannya dalam Rencana Strategis (Renstra) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di dalam Renstra, kebijakan pendidikan ditempatkan pada posisi utama, sejalan dengan urusan wajib pemerintahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 13 Tahun 2006.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat sampai di daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dinas PPO) Kabupaten Sumba Barat Daya menempatkan perencanaan sebagai langkah strategis untuk merumuskan program pembangunan pendidikan yang baik, tepat, terukur dan efektif sehingga bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas baik di masa sekarang maupun di waktu yang akan datang. Langkah strategis tersebut untuk mengemban tugas nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya bekerja sama dengan berbagai instansi terkait lainnya membuat Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (RPDK) Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2010 – 2014. RPDK yang dibuat

tentunya bercermin pada kondisi riil realisasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan tahun 2008 serta visi dan misi pendidikan nasional dan visi misi pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Berdasarkan gambaran umum tentang letak geografis, jumlah penduduk dan profil pendidikan, maka peneliti memberi gambaran secara khusus tentang profil pendidikan dasar di kecamatan Wewewa Selatan

C. Profil Pendidikan Di Kecamatan Wewewa Selatan

1. Profil Penduduk Kecamatan Wewewa Selatan

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Wewewa Selatan	10.095	10.179	20.274

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumba Barat Daya (tahun 2013)

2. Profil Pendidikan Dasar Kecamatan Wewewa Selatan

Kecamatan	SD	SMP	Jumlah
Wewewa Selatan	18	7	

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Sumba Barat Daya (tahun 2013)

D. Identitas Informan Kunci

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1: Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	%
1	Laki - Laki	18	64,29
2	Perempuan	10	35,71
	Jumlah	28	100.00

Sumber : Data primer olahan penulis Tahun 2013

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah responden laki – laki sebanyak 18 responden (64,29%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 orang (35,71%)

2. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2 :Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Sarjana	22	78,57
2	SMA	6	21,43
	Jumlah	28	100.00

Sumber : Data primer olahan penulis Tahun 2013

Berdasarkan dapat dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa responden berpendidikan sarjana sebanyak 22 orang responden (78,57%) sedangkan responden yang berpendidikan SMA masing – masing sebanyak 6 orang responden (21,43%)

3. Responden Berdasarkan Jabatan

Responden berdasarkan jabatan yang diduduki dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3 : Responden berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Kepala Sekolah	14	50
2	Bendahara	14	50
Jumlah		28	100

Sumber : Data primer olahan penulis Tahun 2013

UNIVERSITAS TERBUKA

E. Analisis Peran Komite Sekolah Dalam Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya

Pada umumnya, setiap lembaga pendidikan merupakan suatu institusi yang memposisikan diri dengan meminjam istilah dalam dunia manajemen sebagai industri jasa, yaitu institusi yang memberikan pelayanan (*service*) sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Pelayanan atau jasa yang diberikan sudah barang tentu harus berupa sesuatu yang bermutu, yang bisa memberikan kepuasan kepada *customers* (pelanggan).

Secara sederhana pelanggan (*customers*) institusi pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu *internal customer* dan *external customer*. *Internal customer* adalah pengelola institusi pendidikan itu sendiri, yaitu kepala sekolah sebagai *manager* sekaligus *leader*, guru dan karyawan. Sedangkan *external customer* adalah masyarakat, pemerintah dan dunia industri.

Suatu institusi pendidikan dikatakan bermutu, apabila kedua *customer* tersebut telah terjalin kepuasan atas jasa yang telah diberikan oleh institusi pendidikan terkait. *Internal customer* berposisi sebagai pihak yang memberi pelayanan dan merasa terpuaskan atas pelayanan yang diberikan. Sedangkan *external customer* adalah sebagai pihak yang terpuaskan mendapat pelayanan dari *Internal customer*

Untuk inilah, institusi pendidikan membutuhkan suatu system (manajemen) pengelolaan yang mampu memberdayakan institusi

pendidikan agar lebih bermutu dan mampu memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik *Internal customer* maupun *external customer*. Kelangsungan hidup suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat pelanggan (orang tua, siswa, dan *stakeholder*) terhadap lembaga pendidikan tersebut. Dukungan pelanggan tersebut juga tergantung apakah kebutuhan dan keinginannya dapat dipenuhi dan dipuaskan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat memwadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi *transparan, akuntabel, dan demokratis* dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Oleh karena begitu pentingnya keberadaan Komite di institusi pendidikan, maka tentunya bukan hanya kehadiran organisasi atau lembaga sebagai pelengkap struktur institusi kependidikan, akan tetapi yang lebih penting dari pada itu adalah peran komite dalam mengembangkan pendidikan. Untuk mengetahui peran komite dalam mengembangkan lembaga pendidikan di Kecamatan Wewea Selatan Kabupaten Sumba Barat

Daya, maka berikut ini penulis menjelaskan beberapa temuan hasil penelitian tentang peran komite sebagai berikut :

1. Analisis Peran Komite dalam memberikan pertimbangan program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya

Komite Sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang sebagai mitra kerja kepala sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Melalui komite sekolah, orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah. Selama ini keberadaan komite sekolah sangat berarti sekali bagi setiap satuan pendidikan. Karena komite sekolah itu merupakan pembantu utama satuan pendidikan dalam memakmurkan pendidikan sekolah (lembaga pendidikan) selain masyarakat internal sekolah.

Segala macam program maupun kebijakan yang akan dilaksanakan sekolah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Komite Sekolah. Sebab, segala macam kebijakan yang akan diterapkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal maupun eksternal sekolah. Peran Komite Sekolah dalam memberikan

pertimbangan dapat dilihat dalam hasil rapat bersama antara Komite Sekolah dengan Sekolah berikut ini :

Tabel 4.4. Petimbangan Komite Sekolah dalam Rapat Bersama SMP Satap Waiwaga

Hari/tgl	Acara rapat	Jumlah anggota	Notulen Rapat Komite
Senin, 9-1- 2012	<p>1. Perencanaan serah terima jabatan kepala sekolah lama kepada kepala sekolah baru</p> <p>2. Pembentukan administrasi dalam rangka serah terima jabatan.</p> <p>3. Warnasari</p>	30 Org	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah (atas nama) Yohanes Ngongo Dede selaku pimpinan rapat memperkenalkan kepala sekolah yang baru atas nama Drs Bastian Tunggu Solo. Kepala sekolah yang lama atas nama Yohanes Ngongo Dede, menghimpun seluruh dewan guru, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh gereja, untuk menerima kedatangan Drs Bastian Tunggu Solo, membawa perubahan SD Impres Wai waga beralih status menjadi SMP SATAP WAI WAGHA. Dengan mengacuh aturan pemerintah maka kepala sekolahnya harus berkualifikasi pendidikan SI, Maka wajar secara aturan kita semua menerima kedatangan beliau. • Kepala Sekolah lama, karena aturan bersedia secara ikhlas menyerahkan jabatan kepada Drs Bastian Tunggu Solo, sedangkan saya dari kualifikasi pendidikan (mantan kepala sekolah) berkualifikasi pendidikan D2. • Bersedia menyelesaikan semua administrasi selambat-lambat satu minggu sesudah acara serah terima jabatan yang berlangsung secara kolektif bertempat di SMPN 1 WEWEWA SELATAN . Yang dihadiri kepala dinas PPO Kabupaten Sumba Barat Daya, dan kepala bidang pendidikan dasar atau menengah kabupaten Sumba Barat Daya.

<p>Pertimbangan di luar rapat dalam hal ketegangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendata calon guru tamatan SI di wilayah wai waga untuk menjadi tenaga di SMP dan honor dari dana bos sesuai dengan kemampuan keuangan. • Mantan kepala sekolah agar berkomunikasi dengan pejabat berwenang kalau boleh dilantik lagi menjadi kepala sekolah pada SD lain, atau dilantik menjadi pengawas TK-SD, sebab pengawas sekolah sebagai jabatan fungsional tertinggi. • Komite memberi pertimbangan status dari kepala SD menjadi Pengawas TK-SD, Kabupaten Sumba Barat Daya
--	--

Sumber Data Sekunder

Tabel 4.5 : Petimbangan Komite Sekolah dalam Rapat Bersama SMP 1 Wewewa Selatan

Hari / Tgl	Agenda/ Acara Rapat	Jumlah anggota komite	Natulen rapat komite
Rabu, 11-1-2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana anggaran belanja (RABS) dari sumber dana Bos. 2. Penetapan jumlah guru honor Bos dengan pegawai honor kebersihan (Service Cleaner). 3. Evaluasi tugas guru / pembenahan revisi, tugas pengajar diatur wakil kepala sekolah urusan kurikulum. 	<p>Yang hadir 40 orang guru honor Bos, pengurus komite.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana anggaran belanja sekolah dari Sumber Dana Bos. Disepakati mengacu pada juknis penggunaan dana Bos thn 2012 yaitu 13 item pembiayaan / 13 komponen pembiayaan. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembelian / pengadaan buku teks pelajaran yaitu buku Penjaskes, buku PKN, buku Kesenian. 5% dari total dana Bos pada SMPN 1 Wewewa Selatan. b. Tahun anggaran 2012. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. c. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler. d. Kegiatan ulangan dan ujian, yaitu ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan

			<p>semester serta ujian akhir bagi kelas IX TP. 2011/2012.</p> <p>e. Pembelian bahan-bahan habis pakai berupa kertas, alat tulis kantor, kapur tulis, minum harian guru / pegawai setiap hari di sekolah = Rp 3.000/ gelas.</p> <p>f. Langganan daya dan jasa, berupa air bersih pertengki disepakati Rp 250.000/tengki yang berisi 5000 liter.</p> <p>g. Perawatan sekolah (Pengecatan Tembok), perbaikan ruang kelas yang rusak.</p> <p>h. Pembayaran honorarium bulanan guru honorari (20% dari dana Bos), mata pelajaran yang diajar. Atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yunita Bulu, S.Pd Rp 800.000/bulan 2. Yohanis Ngongo, S.Pd Rp 800.000/bulan 3. Yohanis Malo Bora, S.Pd Rp 800.000/bulan 4. Godeliva Lede, S.Pd Rp 800.000/bulan. <p>i. Pengembangan profesi guru, diklat KTSP. Nara sumber pengawas sekolah menjadi MGMP tingkat Kec. Wewewa Selatan.</p> <p>j. Membantu siswa miskin kepada 130 org siswa Rp 15.000 setiap siswa/ termin</p> <p>k. Pembiayaan pengeioiaan Bos kepada team Bos tingkat</p>
--	--	--	--

		<p>sekolah, kepala sekolah, bendahara, wakil orang tua murid serta salah satu seorang guru senior.</p> <p>l. Pembelian perangkat komputer i unit seharga Rp 7.500.000.</p> <p>m. Biaya lain-lain : berupa honor penulisan ijasah Rp 10.000/ lembar.</p> <p>Rancangan Anggaran Belanja Sekolah dari dana Bos, dikawal ketua komite, sambil menunggu petunjuk teknis dari Manajer Bos tingkat kabupaten, sesudah disetujui baru dibacakan uang dihadapan orang tua/komite yang dihadiri oleh guru-guru dan pegawai.</p>
<p>Memberi pertimbangan diluar rapat, dalam hal apa pertimbangan tersebut diberikan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Guru honor yang diterima sekolah kalau boleh memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai dan guru mata pelajaran Ujian Nasional Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan mata pelajaran IPA. • Tenaga kependidikan honorer yang diterima bukan karena sesuku, sewilayah, kecamatan, atau keluarga sendiri tetapi terlebih karena memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai yaitu strata satu. • Dalam hal kerjasama, Komite mengingatkan supaya kerjasama dikalangan guru sehingga cita-cita bercama tercapai memperhatikan proses pembelajaran yang bermutu sehingga hasilnya pun bermutu, sehingga pada akhirnya menyenangkan masyarakat. • Dalam hal penggunaan fasilitas umum milik sekolah, supaya sekolah mengingatkan kepada seluruh siswa agar tetap menjaga meubeler.

	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal keharmonisan antar siswa agar siswa tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah pada jam-jam kegiatan belajar. Mengajar, karena ketika semua guru asyik di sekolah lalu tanpa sepengetahuan guru mereka pulang.
--	--

Sumber Data Sekunder

Untuk mengetahui sejauhmana keterlibatan komite dalam memberi pertimbangan kebijakan program pendidikan, maka dapat dilihat pendapat responden berikut ini :

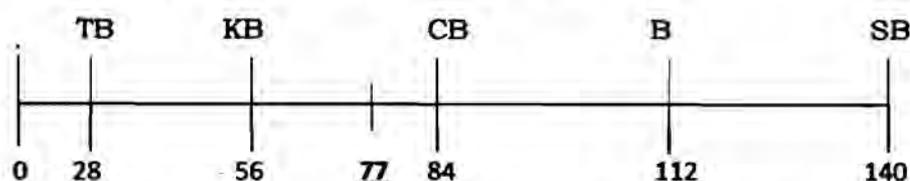
Tabel 4. 6. Kebijakan Pendidikan

Alternatif Pilihan	Pilihan Responden	Bobot	Skor
Sangat Baik	2	5	10
Baik	6	4	24
Cukup Baik	4	3	12
Kurang Baik	15	2	30
Tidak Baik	1	1	1
Jumlah	28		77

Sumber : Data primer, oiahan penulis tahun 2013

Berdasarkan jawaban responden sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebanyak 2 orang responden mempunyai jawaban sangat baik, 6 orang responden mempunyai jawaban baik, 4 orang responden mempunyai jawaban cukup baik 15 responden mempunyai jawaban kurang baik dan 1 responden mempunyai jawaban tidak baik. Jawaban responden ini selanjutnya dikalikan dengan bobot dari masing – masing alternatif pilihan sehingga menghasilkan skor sangat baik 10, skor baik 24, skor cukup baik 12, skor kurang baik 30 dan skor tidak baik 1. Jumlah skor jawaban responden adalah 77. Untuk mengetahui jawaban responden

terhadap peran komite dalam hal memberi pertimbangan terhadap kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, maka jumlah skor tersebut dapat di uji melalui rentang kreteria sebagai berikut :



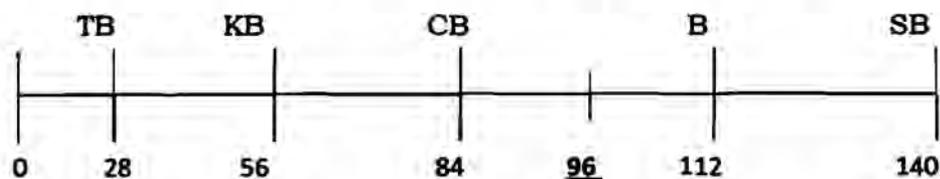
Jumlah skor yang digambarkan secara kontinum adalah untuk skor ideal / skor maksimum senilai 140 ($5 \times 28 = 140$) dan untuk skor minimum adalah senilai 28 ($1 \times 28 = 28$). Dengan demikian berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 28 responden menghasilkan nilai skor sebesar 77 jika dimasukkan dalam rentang kreteria, maka angka 77 terletak diantara 56 – 84 yang berada pada daerah **cukup baik**. Ini artinya bahwa penilaian sekolah terhadap peran komite dalam memberikan pertimbangan kepada sekolah berada dalam kategori cukup baik. Selanjutnya apabila dilihat dari prosentase maka tingkat partisipasi komite dalam hal memberikan pertimbangan tentang kebijakan pendidikan mencapai 55% ($77/140 \times 100\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa komite belum secara maksimal berpartisipasi dalam hal memberikan pertimbangan kebijakan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing – masing. Selanjutnya untuk mengetahui peran komite dalam hal memberikan pertimbangan tentang program pendidikan sekolah, maka dapat dilihat analisis jawaban responden berikut ini:

Tabel 4.7 :Program Pendidikan Sekolah

Alternatif Pilihan	Pilihan Responden	Bobot	Skor
Sangat Baik	3	5	15
Baik	8	4	32
Cukup Baik	15	3	45
Kurang Baik	2	2	4
Tidak Baik	0	1	0
Jumlah	28		96

Sumber : Data primer olahan penulis tahun 2013

Berdasarkan jawaban responden sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebanyak 3 orang responden mempunyai jawaban sangat baik, 8 orang responden mempunyai jawaban baik, 15 orang responden mempunyai jawaban cukup baik 2 responden mempunyai jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang mempunyai jawaban tidak baik. Jawaban responden ini selanjutnya dikalikan dengan bobot dari masing – masing alternatif pilihan sehingga menghasilkan skor sangat baik 15, skor baik 32, skor cukup baik 45, skor kurang baik 4 dan skor tidak baik 0. Jumlah skor jawaban responden adalah 96. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap peran komite dalam hal memberi pertimbangan terhadap program pendidikan sekolah di satuan pendidikan, maka jumlah skor tersebut dapat di uji melalui rentang kreteria sebagai berikut :



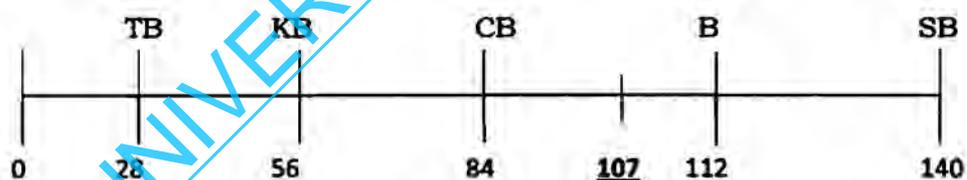
Jumlah skor yang digambarkan secara kontinum adalah untuk skor ideal / skor maksimum senilai 140 ($5 \times 28 = 140$) dan untuk skor minimum adalah senilai 28 ($1 \times 28 = 28$). Dengan demikian berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 28 responden menghasilkan nilai skor sebesar 96 jika dimasukkan dalam rentang kriteria, maka skor angka 96 terletak diantara 84 – 112 yang berada pada daerah baik. Ini artinya bahwa penilaian sekolah terhadap peran Komite dalam memberikan pertimbangan program pendidikan sekolah berada dalam kategori baik. Selanjutnya apabila dilihat dari prosentase peran maka tingkat partisipasi komite dalam hal memberikan pertimbangan tentang program pendidikan mencapai 68,57% ($96/140 \times 100\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa komite belum secara maksimal berpartisipasi dalam hal memberikan pertimbangan program pendidikan sekolah yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing – masing. Selanjutnya untuk mengetahui peran komite dalam hal memberikan pertimbangan tentang Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RABS) sekolah, maka dapat dilihat analisis jawaban responden berikut:

Tabel 4.8 : Rencana Anggaran dan Belanja Daerah

Alternatif Pilihan	Pilihan Responden	Bobot	Skor
Sangat Baik	8	5	40
Baik	11	4	44
Cukup Baik	5	3	15
Kurang Baik	4	2	8
Tidak Baik	0	1	0
Jumlah	28		107

Sumber : Data primer olahan penulis tahun 2013

Berdasarkan jawaban responden sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebanyak 8 (delapan) orang responden mempunyai jawaban sangat baik, 11 orang responden mempunyai jawaban baik, 5 orang responden mempunyai jawaban cukup baik 4 responden mempunyai jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang mempunyai jawaban tidak baik. Jawaban responden ini selanjutnya dikalikan dengan bobot dari masing – masing alternatif pilihan sehingga menghasilkan skor sangat baik 40, skor baik 44, skor cukup baik 15, skor kurang baik 8 dan skor tidak baik 0. Jumlah skor jawaban responden adalah 107. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap peran komite dalam hal memberi pertimbangan terhadap Rencana Pendapatan dan Sekolah di satuan pendidikan, maka jumlah skor tersebut dapat di uji melalui rentang kreteria sebagai berikut :



Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 28 responden menghasilkan nilai skor sebesar 107 jika dimasukkan dalam rentang kreteria, maka skor angka 107 terletak diantara 84 – 112 yang berada pada daerah **baik** . Ini artinya bahwa penilaian sekolah terhadap peran komite dalam memberikan pertimbangan RABS berada dalam kategori baik. Selanjutnya apabila dilihat dari prosentase peran maka tingkat partisipasi komite dalam hal memberikan pertimbangan tentang RABS mencapai

76,43% ($107/140 \times 100\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa komite telah berpartisipasi dalam hal memberikan pertimbangan RABS yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing – masing dengan baik. Selanjutnya untuk mengetahui peran komite dalam hal memberikan pertimbangan tentang kriteria tenaga kependidikan sekolah, maka dapat dilihat analisis jawaban responden berikut ini:

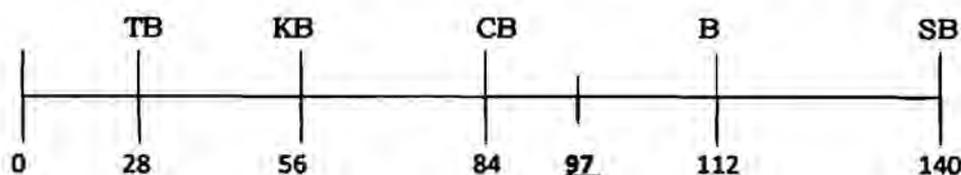
Tabel 4.9: Kriteria Tenaga Kependidikan

Alternatif Pilihan	Pilihan Responden	Bobot	Skor
Sangat Baik	6	5	30
Baik	5	4	20
Cukup Baik	13	3	39
Kurang Baik	4	2	8
Tidak Baik	0	1	0
Jumlah	28		97

Sumber : Data primer olahan penulis tahun 2013

Berdasarkan jawaban responden sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebanyak 6 orang responden mempunyai jawaban sangat baik, 5 orang responden mempunyai jawaban baik, 13 orang responden mempunyai jawaban cukup baik 4 responden mempunyai jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang mempunyai jawaban tidak baik. Jawaban responden ini selanjutnya dikalikan dengan bobot dari masing – masing alternatif pilihan sehingga menghasilkan skor sangat baik 30, skor baik 20, skor cukup baik 39, skor kurang baik 8 dan skor tidak baik 0. Jumlah skor jawaban responden adalah 97. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap peran komite dalam hal memberi pertimbangan terhadap

kriteria tenaga kependidikan di satuan pendidikan, maka jumlah skor tersebut dapat di uji melalui rentang kreteria sebagai berikut :



Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 28 responden menghasilkan nilai skor sebesar 97 jika dimasukkan dalam rentang kreteria, maka skor angka 97 terletak diantara 84 – 112 yang berada pada daerah baik. Ini artinya bahwa penilaian sekolah terhadap peran komite dalam memberikan pertimbangan tentang kriteria tenaga kependidikan berada dalam kategori baik. Selanjutnya apabila dilihat dari prosentase peran maka tingkat partisipasi komite dalam hal memberikan pertimbangan tentang kriteria tenaga kependidikan mencapai 69,29% ($97/140 \times 100\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa komite telah berpartisipasi dalam hal memberikan pertimbangan tentang kriteria tenaga kependidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing – masing dengan baik.

2. Analisis Peran Komite dalam memberikan dukungan program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan

masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidikan.

Peran pendukung yang dipegang oleh komite sekolah tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, namun lebih dari itu. Dengan berperan sebagai *supporting agency* ini, komite sekolah diharapkan dapat mendorong dan menyadarkan para orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Karena pendidikan khususnya lembaga (satuan) pendidikan tidak akan dapat berperan sebagaimana fungsinya sebagai lembaga pembentuk generasi beradab dan berpengetahuan tanpa mendapat dukungan besar dari masyarakat luas (*stakeholders*).

Pada dasarnya pendidikan yang baik membutuhkan penyediaan sarana prasarana yang memadai, ruang belajar yang cukup, serta biaya yang banyak. Akan tetapi selama ini anggaran yang terdapat di sekolah sangat terbatas, oleh karenanya dalam hal ini masyarakat diharapkan menjadi penanggung jawab dan donatur yang memberikan dana demi kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah. Masyarakat yang berminat dan bersimpati dapat memberikan bantuannya melalui berbagai cara, misalnya: membantu penyediaan alat peraga, buku-buku, serta memberikan biaya kepada anak didik yang kurang mampu atau bahkan menjadi orang tua asuh.

Komite Sekolah sangat membantu kemandirian sekolah dalam hal anggaran, fasilitas sekolah yang masih kurang, mencarikan dana untuk

menambah insentif guru, dengan mengajukan bantuan dana tanpa memberatkan orang tua siswa. Anggaran itu diperoleh dari upaya anggota komite sekolah sendiri atau melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti alumni sekolah. Orang tua siswa yang mengetahui adanya kekurangan kekurangan di sekolah dapat memberikan bantuan keuangan atau barang barang, baik secara perorangan maupun lembaga. Selain fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam hal ini komite sekolah juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan. Peran Komite Sekolah dalam memberikan dukungan dapat dilihat dalam dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.10 : Dukungan Komite Sekolah dalam tahun 2010 s/d 2012

Tahun pelajaran	Uang	Bahan/Materi	Tenaga Jumlah
2010		<ul style="list-style-type: none"> • Batu gunung 5 ret untuk membantu penimbunan pondasi ruang laboratoriu m IPA hasil swa kelola. • Kayu, bamboo dijadikan andang mem bangun tembok ruane laboratoriu 	5 Orang setiap hari 1 Orang kepala tukang 4 Orang pembantu tukang
2011		Batu gunung bambu, kayu (pengamanan kintal sekolah), usuk untuk perbaikan kaki meja dan kursi	45 orang membuat pagar sekolah
	Rp 15.180.000 Biaya rehab 100 buah kursi dan 50 buah meja untuk rehab berat sehingga 100 buah kursi		Guru honor bos untuk mengajar di SMP. Honorinya

2012	dan 50 buah meja siswa. Siswa miskin sebanyak 130 Orang tidak menyumbang karena yatim/piatu. Tidak ada orang tua lagi yang memberi mereka uang		belum memadai karena jumlah siswa sedikit.
------	--	--	--

Sumber : Rancangan Anggaran dan Belanja Sekolah (RABS)

Untuk mengetahui keterlibatan komite dalam memberi dukungan peningkatan program pendidikan, maka dapat dilihat pendapat responden berikut ini :

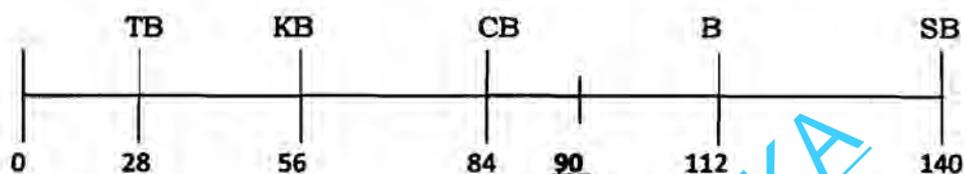
Tabel 4 .11:Mendorong orang tua berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan

Alternatif Pilihan	Pilihan Responden	Bobot	Skor
Sangat Baik	4	5	20
Baik	8	4	32
Cukup Baik	9	3	27
Kurang Baik	4	2	8
Tidak Baik	3	1	3
Jumlah	28		90

Sumber : Data primer olahan penulis tahun 2013

Berdasarkan jawaban responden sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebanyak 4 orang responden mempunyai jawaban sangat baik, 8 orang responden mempunyai jawaban baik, 9 orang responden mempunyai jawaban cukup baik 4 responden mempunyai jawaban kurang baik dan 3 responden yang mempunyai jawaban tidak baik. Jawaban responden ini selanjutnya dikalikan dengan bobot dari masing – masing alternatif pilihan sehingga menghasilkan skor sangat baik 20, skor baik 32, skor cukup baik 27, skor kurang baik 8 dan skor tidak baik 3. Jumlah skor jawaban responden adalah 90. Untuk mengetahui jawaban responden

terhadap peran komite dalam hal memberi pertimbangan terhadap dorongan orang tua berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan di satuan pendidikan, maka jumlah skor tersebut dapat di uji melalui rentang kreteria sebagai berikut :

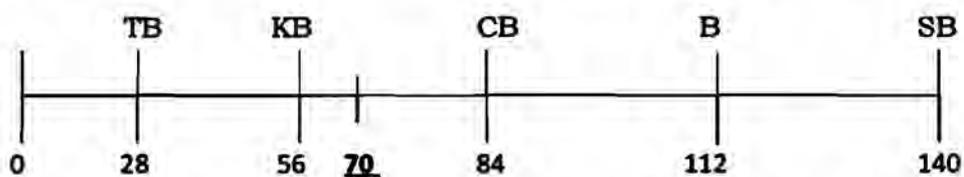


Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 28 responden menghasilkan nilai skor sebesar 90 jika dimasukkan dalam rentang kreteria, maka skor angka 90 terletak diantara 84 – 112 yang berada pada daerah baik . Ini artinya bahwa penilaian sekolah terhadap peran komite dalam memberikan pertimbangan tentang dorongan orang tua berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan berada dalam kategori baik. Selanjutnya apabila dilihat dari prosentase peran maka tingkat partisipasi komite dalam hal memberikan pertimbangan tentang Mendorong orang tua berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan mencapai 64,29% ($90/140 \times 100\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa komite telah berpartisipasi dalam hal memberikan pertimbangan tentang dorongan orang tua berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing – masing dengan baik. Untuk mengetahui partisipasi komite dalam memberi dukungan peningkatan program pendidikan, maka dapat dilihat pendapat responden berikut ini

Tabel 4.12 :Menggalang dana untuk pembiayaan pendidikan

Alternatif Pilihan	Pilihan Responden	Bobot	Skor
Sangat Baik	0	5	0
Baik	4	4	16
Cukup Baik	9	3	27
Kurang Baik	12	2	24
Tidak Baik	3	1	3
Jumlah	28		70

Berdasarkan jawaban responden sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak ada responden yang mempunyai jawaban sangat baik, 4 orang responden mempunyai jawaban baik, 9 orang responden mempunyai jawaban cukup baik 12 responden mempunyai jawaban kurang baik dan 3 responden yang mempunyai jawaban tidak baik. Jawaban responden ini selanjutnya dikalikan dengan bobot dari masing – masing alternatif pilihan sehingga menghasilkan skor sangat baik 0, skor baik 16, skor cukup baik 27, skor kurang baik 24 dan skor tidak baik 3. Jumlah skor jawaban responden adalah 70. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap peran komite dalam hal memberi pertimbangan untuk menggalang dana pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan, maka jumlah skor tersebut dapat di uji melalui rentang kreteria sebagai berikut



Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 28 responden menghasilkan nilai skor sebesar 70 jika dimasukkan dalam rentang

kreteria, maka skor angka 70 terletak diantara 56 – 84 yang berada pada daerah **kurang baik**. Ini artinya bahwa penilaian sekolah terhadap peran komite dalam memberikan pertimbangan tentang penggalangan dana untuk pembiayaan pendidikan dalam pelayanan pendidikan berada dalam kategori kurang baik. Selanjutnya apabila dilihat dari prosentase peran maka tingkat partisipasi komite dalam hal memberikan pertimbangan tentang penggalangan dana untuk pembiayaan pendidikan mencapai 50% ($70/140 \times 100\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa komite belum maksimal berpartisipasi dalam hal memberikan pertimbangan tentang penggalangan dana untuk pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing – masing dengan baik. Untuk mengetahui partisipasi komite dalam memberi dukungan peningkatan program pendidikan, maka dapat dilihat pendapat responden berikut ini:

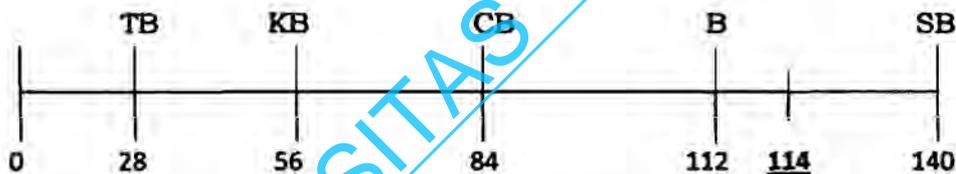
Tabel 4.13: Mendorong Komitmen masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu

Alternatif Pilihan	Pilihan Responden	Bobot	Skor
Sangat Baik	11	5	55
Baik	9	4	36
Cukup Baik	7	3	21
Kurang Baik	1	2	2
Tidak Baik		1	0
Jumlah	28		114

Sumber : Data primer olahan penulis tahun 2013

Berdasarkan jawaban responden sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebanyak 11 orang responden mempunyai jawaban sangat baik, 9 orang responden mempunyai jawaban baik, 7 orang responden mempunyai jawaban cukup baik, 1

responden mempunyai jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang mempunyai jawaban tidak baik. Jawaban responden ini selanjutnya dikalikan dengan bobot dari masing – masing alternatif pilihan sehingga menghasilkan skor sangat baik 55, skor baik 36, skor cukup baik 21, skor kurang baik 2 dan skor tidak baik 0. Jumlah skor jawaban responden adalah 114. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap peran komite dalam hal memberi pertimbangan dalam hal Mendorong Komitmen masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu dalam pelayanan pendidikan di satuan pendidikan, maka jumlah skor tersebut dapat di uji melalui rentang kriteria sebagai berikut :



Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 28 responden menghasilkan nilai skor sebesar 114 jika dimasukkan dalam rentang kriteria, maka skor angka 114 terletak diantara 112 – 140 yang berada pada daerah baik . Ini artinya bahwa penilaian sekolah terhadap peran komite dalam memberikan pertimbangan tentang dorongan komitmen masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu dalam pelayanan pendidikan berada dalam kategori baik. Selanjutnya apabila dilihat dari prosentase peran maka tingkat partisipasi komite dalam hal memberikan pertimbangan tentang penggalangan dana untuk pembiayaan pendidikan mencapai 81,43% ($114/140 \times 100\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa komite telah cukup

maksimal berpartisipasi dalam hal memberikan pertimbangan tentang dorongan komitmen masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing – masing dengan baik.

3. Analisis Peran Komite dalam mengontrol program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya

Peran Komite Sekolah selanjutnya adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Peran pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu *output* pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan agama.

Peran *controlling* ini juga dimaksudkan agar komite sekolah sebagai partner sekolah dan masyarakat memberikan *service* yang memuaskan, terlebih yang berhubungan dengan *input* dan *output* yang dihasilkan sekolah. Karena sistem sekolah berada di tengah-tengah masyarakat, maka antara *input* dan *output* pun yang dihasilkan sekolah harus dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengguna. Peran Komite Sekolah dalam mengontrol pelaksanaan program sekolah dapat dilihat dalam dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.14 : Peran Komite Sekolah dalam Mengontrol Program Sekolah

Hari / Tgl Kunjungan komite	Maksud kunjungan	Saran / Rekomendasi dari komite
Sabtu, 3-9-2011	Memonitor persiapan ulangan tengah semester ganjil tahun 2011-2012	Tingkatkan kerjasama, memantapkan persiapan berupa penyusunan soal ulangan tengah semester demi keberhasilan murid ke depan.
Jumat, 23-12-2011	Menghadiri pembagian laporan pendidikan siswa.	Laporan ini merupakan hadiah memasuki hari raya natal, biarlah kehadiran ISA Almasi, membawa roh semangat baru
Senin, 9-1-2012	Menghadiri tatap muka perdana kepala sekolah yang baru Drs Bastian Tanggu Solo menggantikan Yohanes Ngongo Dede.	Mengamankan tugas pelayanan public demi masyarakat. Orang boleh berani karena aturan, tetapi yang diurus tetap satu tujuan yakni pengelolaan pendidikan yang bermutu.
Jumat, 20-4-2012	Rapat koordinasi PORSENI SD tingkat gugus rara sebelum menuju tingkat Kec. Wewewa Selatan	Orang tua murid menjaga keterlibatan, menjaga keamanan saat anak bermain.
Rabu, 11-01-2012	Menghadiri rapat penyusunan RABS dari sumber dana Bos bersama-sama dengan dewan guru.	Hendaknya keuangan dikelola dengan baik agar sesuai sasaran
Rabu, 18-01-2012	Menghadiri dan penandatanganan RABS Bos tahun anggaran 2012, hasil revisi team Bos Kabupaten	Laksana kesepakatan sesuai apa yang tertuang didalam rencana Anggaran Belanja Sekolah, utamakan kebutuhan yang prioritas terlebih ATK, dan honorarium guru honor Bos.
Rabu, 25-01-2012	Memantau pelaksanaan les tambahan kepada siswa kelas 1X	Laksana bedah soal 3 tahun pelajaran terakhir, dan bias memprediksi materi soal yang bakal muncul tahun ini, supaya hasil ujian tidak mengecewakan
Sabtu, 10-03-2012	Menghadiri rapat pembentukan panitia pengembangan sekolah dan unsur komite	Laksanakan sesuai mekanisme yang benar agar terwujud rehab berat, 3 ruang kelas sesuai harapan kita dari sumber dana Blockgrand : Rp 270.000.000 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Senin, 17-04-2012	Menghadiri rapat para kepala SMP sekecamatan Wewewa Selatan yang berlangsung di SMPN 1 Wewewa Selatan	PORSENI / O2SN Tingkat kecamatan yang berlangsung dan berakhir pada bulan Mei, merupakan arena siswa menggali potensi diri, kelas IX tak perlu diikutkan, supaya konsentrasi untuk menyiapkan diri memasuki Ujian Nasional.
Rabu, 10-2012	Menghadiri / memantau pembagian beasiswa kepada 10 Orang yang menerima beasiswa miskin dan beasiswa prestasi	Diberikan kepada mereka yang ada namanya sesuai penetapan dari Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Sumber : Buku Monitoring Sekolah

Untuk mengetahui sejauhmana keterlibatan Komite Sekolah dalam mengontrol peningkatan program pendidikan, maka dapat dilihat pendapat responden berikut ini

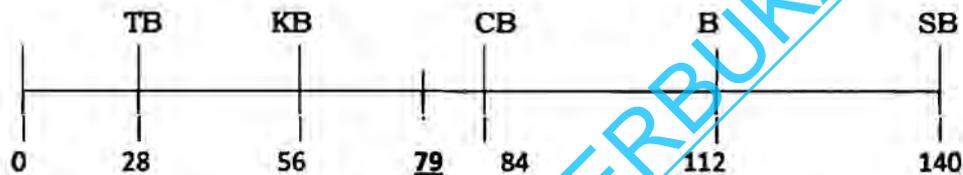
Tabel 4.15 :Melakukan evaluasi kegiatan

Alternatif Pilihan	Pilihan Responden	Bobot	Skor
Sangat Baik	2	5	10
Baik	7	4	28
Cukup Baik	6	3	18
Kurang Baik	10	2	20
Tidak Baik	3	1	3
Jumlah	28		79

Sumber : Data primer olahan penulis tahun 2013

Berdasarkan jawaban responden sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebanyak 2 orang responden mempunyai jawaban sangat baik, 7 orang responden mempunyai jawaban baik, 6 orang responden mempunyai jawaban cukup baik, 10 responden mempunyai jawaban kurang baik dan 3 responden yang mempunyai jawaban tidak baik. Jawaban responden ini selanjutnya dikalikan dengan bobot dari masing – masing alternatif pilihan sehingga menghasilkan skor

sangat baik 10, skor baik 28, skor cukup baik 18, skor kurang baik 20 dan skor tidak baik 3. Jumlah skor jawaban responden adalah 79. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap peran komite dalam hal memberi pertimbangan dalam hal evaluasi kegiatan terhadap pendidikan pelaksanaan program di satuan pendidikan, maka jumlah skor tersebut dapat di uji melalui rentang kreteria sebagai berikut :



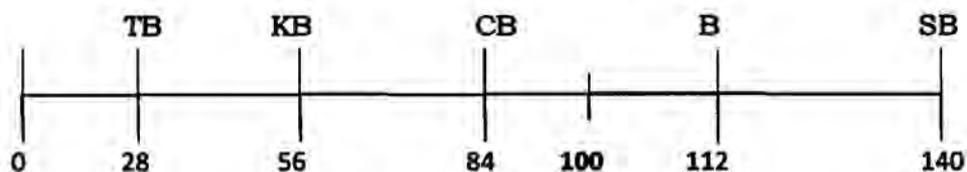
Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 28 responden menghasilkan nilai skor sebesar 79 jika dimasukkan dalam rentang kreteria, maka skor angka 79 terletak diantara 56 – 84 yang berada pada daerah cukup baik. Ini artinya bahwa penilaian sekolah terhadap peran komite dalam memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan evaluasi program dalam pelayanan pendidikan berada dalam kategori cukup baik. Selanjutnya apabila dilihat dari prosentase peran maka pelaksanaan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan oleh komite mencapai 56,43% ($79/140 \times 100\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa komite belum maksimal berpartisipasi dalam hal memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan evaluasi program pendidikan yang bermutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing – masing dengan baik. Untuk mengetahui keterlibatan komite dalam memberi dukungan peningkatan program pendidikan, maka dapat dilihat pendapat responden berikut ini :

Tabel 4.16 : Melakukan pengawasan terhadap program penyelenggaraan pendidikan

Alternatif Pilihan	Pilihan Responden	Bobot	Skor
Sangat Baik	6	5	30
Baik	8	4	32
Cukup Baik	10	3	30
Kurang Baik	4	2	8
Tidak Baik	0	1	0
Jumlah	28		100

Sumber : Data primer olahan penulis tahun 2013

Berdasarkan jawaban responden sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebanyak 6 orang responden mempunyai jawaban sangat baik, 8 orang responden mempunyai jawaban baik, 10 orang responden mempunyai jawaban cukup baik, 4 responden mempunyai jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang mempunyai jawaban tidak baik. Jawaban responden ini selanjutnya dikalikan dengan bobot dari masing – masing alternatif pilihan sehingga menghasilkan skor sangat baik 30, skor baik 32, skor cukup baik 38, skor kurang baik 8 dan skor tidak baik 0. Jumlah skor jawaban responden adalah 100. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap peran komite dalam memberi pertimbangan tentang pelaksanaan pengawasan terhadap program penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, maka jumlah skor tersebut dapat di uji melalui rentang kreteria sebagai berikut :



Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 28 responden menghasilkan nilai skor sebesar 100 jika dimasukkan dalam rentang kriteria, maka skor angka 100 terletak diantara 84 – 112 yang berada pada daerah cukup baik. Ini artinya bahwa penilaian sekolah terhadap peran komite dalam memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan pengawasan terhadap program penyelenggaraan pendidikan berada dalam kategori baik. Selanjutnya apabila dilihat dari prosentase peran maka pelaksanaan pengawasan terhadap program penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh komite mencapai 71,43% ($100/140 \times 100\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa cukup maksimal berpartisipasi dalam hal memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan pengawasan terhadap program penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing – masing dengan baik. Untuk mengetahui keterlibatan komite dalam memberi dukungan peningkatan program pendidikan, maka dapat dilihat pendapat responden berikut ini

4. Analisis Peran Komite dalam memediator sekolah dengan masyarakat dalam program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya

Komite Sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini

memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua dan masyarakat.

Aspirasi yang disalurkan melalui Komite Sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat *akuntabel* (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite sekolah peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Dalam operasionalnya, Komite Sekolah sebagai mediator ini lebih banyak untuk ditunjukan dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, menampung serta menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Kerjasama dengan masyarakat ini sangat mutlak untuk dilakukan sebab sekolah adalah sebuah sistem yang berada di tengah-tengah masyarakat, hidup dan mati lembaga pendidikan tergantung dari peran serta masyarakat. Peran Komite Sekolah dalam memediasi pelaksanaan program sekolah dan penyelesaian kasus dapat dilihat dalam dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.17 : Peran Komite Sekolah dalam Memediator Program Sekolah dan penyelesaian masalah

Kasus / Masalah	Hasil Penyelesaian
<p>Antara orang tua dan guru Siswa di pukul guru karna menunjukkan perilaku tak terpuji. Lalu orang tuanya datang mempertanyakan mengapa siswa di pukul oleh guru.</p>	<p>Siswa dan orang tuanya menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah menjelaskan / mengklasifikasikan persoalan, bahwa siswa di pukul dalam konteks pembinaan dan bimbingan bahwa menghargai diri dan menunjukkan perilaku terpuji merupakan kebanggaan diri, kebanggaan keluarga, kebanggaan sekolah, dan secara umum kebanggaan masyarakat. Orang tua siswa pun menyadari kekeliruan karena mengganggu ketenangan sekolah dan merebut perhatian siswa 460 Orang.</p>
<p>Antara orang tua murid dengan kepala sekolah " Penarikan kembali tanah lokasi sekolah di SDM Pudda oleh oknum masyarakat</p>	<p>Komite melaporkan ke polisi, POLSEK Wewewa Selatan, Melibatkan saksi-saksi pemerintah desa mengambil keterangan hasil sedang diproses aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi.</p>
<p>Antara orang tua murid dengan kepala sekolah, Pergeseran batas tanah milik SDK Dello, dengan orang tua siswa.</p>	<p>Komite melaporkannya kepada POLSEK Wewewa Selatan. POLSEK Wewewa Selatan mengurus dengan penuh pertimbangan yang tidak merugikan kepada pihak lembaga dan masyarakat. Sekolah di sarankan untuk menyampaikan kepada pertanahan agar melakukan pengukuran tanah dan penentuan batas yang telah di sepakati awal mula berdirinya SDK Delo ini.</p>
<p>Antara guru dan orang tua murid Siswa tidak aman belajar, masalah perbatasan Kecamatan Wewewa Selatan dengan Kecamatan Lamboya Kab. Sumba Barat (Wilayah Konflik) Wilayah perbatasan.</p>	<p>Komite menyikapi dengan memindahkan lokasi sekolah yang aman, Sehingga aktivitas belajar bisa terjadi sambil siswa-siswa yang tidak aman belajarmengikuti proses belajar mengajar di SDM Ede (Berjumlah 60 Orang).</p>
<p>Lapangan SDK Manola kurang panjang dan lebar</p>	<p>Komite, dalam rangka pesta Emas SDK Manola. Komite melakukan kerjasama dengan PU. Dinas terkait guna mendapat bantuan alat berat yaitu Loder untuk meratakan dan memperpanjang atau memperlebar lapangan sepak bola SDK Manola.</p>

	Bahan-bahan untuk alat berat dari sumber komite.
Kasus / Masalah	Hasil Penyelesaian
Guru dengan Orang tua murid Kasus pemukulan siswa oleh guru	Orang tua siswa datang mampir ke sekolah-sekolah dalam hal ini guru memberikan pemahaman kemudian orang tua memahami kondisi setelah diklarifikasi sehingga orang tua kembali ke rumahnya. Dalam hal ini guru sebagai anggota komite mengklarifikasi sendiri persoalan tanpa melibatkan pengurus komite, ketua, atau sekretaris. Dan selanjutnya menjadi rukun kembali hubungan antara orang tua dan guru.
Orang tua murid dengan guru (kasus di SDK Rara mata) Guru tidak bias mengajar pada hari sabtu karena murid tinggalkan sekolah dan pergi ke pasar waimangura.	Komite melakukan tilang siswa yang naik kendaraan menuju ke pasar, komite membawa/menuntun siswa tersebut langsung ke sekolah dan setibanya mereka di sekolah orang tua mereka dipanggil untuk memberikan pemahaman kerugian tidak masuk sekolah sehari, sama dengan membunuh masa depan anak; biarlah orang tua yang bertanggung jawab mengurus kepentingan anaknya sendiri atau mengatur jalannya kegiatan ekonomi rumah tangga.
Guru dengan Orang tua Murid di SDK Manola siswa yang lain ada di ruang kelas, yang lain di luar keterbatasan ruang kelas	Komite menyikapi dan melakukan rapat membuat perencanaan pembangunan dua ruang kelas darurat halus, sehingga tidak ada lagi siswa yang bermain di luar kelas pada saat kegiatan belajar mengajar.

Sumber : Data Sekunder

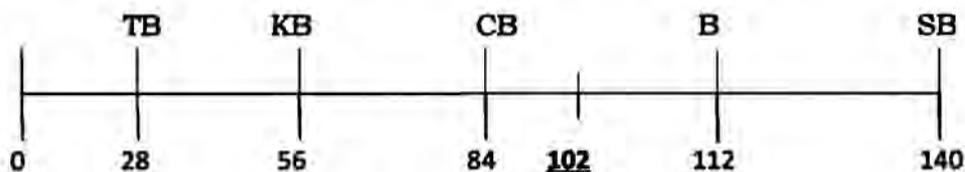
Untuk mengetahui peran komite dalam memediator kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah, maka dapat dilihat pendapat responden berikut ini

Tabel 4.18 : Melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah

Alternatif Pilihan	Pilihan Responden	Bobot	Skor
Sangat Baik	4	5	20
Baik	11	4	44
Cukup Baik	12	3	36
Kurang Baik	1	2	2
Tidak Baik	0	1	0
Jumlah	28		102

Sumber : Data primer olahan penulis tahun 2013

Berdasarkan jawaban responden sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebanyak 4 orang responden mempunyai jawaban sangat baik, 11 orang responden mempunyai jawaban baik, 12 orang responden mempunyai jawaban cukup baik, 1 responden mempunyai jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang mempunyai jawaban tidak baik. Jawaban responden ini selanjutnya dikalikan dengan bobot dari masing – masing alternatif pilihan sehingga menghasilkan skor sangat baik 20, skor baik 44, skor cukup baik 36, skor kurang baik 2 dan skor tidak baik 0. Jumlah skor jawaban responden adalah 102. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap peran komite dalam memberi pertimbangan tentang pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah, maka jumlah skor tersebut dapat di uji melalui rentang kreteria sebagai berikut :



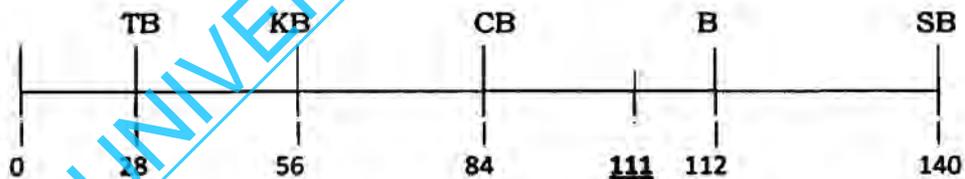
Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 28 responden menghasilkan nilai skor sebesar 102 jika dimasukkan dalam rentang kriteria, maka skor angka 102 terletak diantara 84 – 112 yang berada pada daerah cukup baik . Ini artinya bahwa penilaian sekolah terhadap peran komite dalam pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah terhadap program penyelenggaraan pendidikan berada dalam kategori baik. Selanjutnya apabila dilihat dari prosentase peran maka pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah terhadap program penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh komite mencapai 72,86% ($102/140 \times 100\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa komite cukup maksimal berpartisipasi dalam hal memediator tentang pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah mengenai program penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing – masing dengan . Untuk mengetahui keterlibatan komite dalam memberi dukungan peningkatan program pendidikan, maka dapat dilihat pendapat responden berikut ini

Tabel 4.19 : Menampung aspirasi, ide dan tuntutan masyarakat

Alternatif Pilihan	Pilihan Responden	Bobot	Skor
Sangat Baik	7	5	35
Baik	13	4	52
Cukup Baik	8	3	24
Kurang Baik	0	2	0
Tidak Baik	0	1	0
Jumlah	28		111

Sumber : Data primer olahan penulis tahun 2013

Berdasarkan jawaban responden sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebanyak 7 orang responden mempunyai jawaban sangat baik, 13 orang responden mempunyai jawaban baik, 8 orang responden mempunyai jawaban cukup baik, tidak ada responden yang mempunyai jawaban kurang baik dan juga tidak ada responden yang mempunyai jawaban tidak baik. Jawaban responden ini selanjutnya dikalikan dengan bobot dari masing – masing alternatif pilihan sehingga menghasilkan skor sangat baik 35, skor baik 52, skor cukup baik 24, skor kurang baik 0 dan skor tidak baik 0. Jumlah skor jawaban responden adalah 111. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap peran komite dalam memediator untuk menampung aspirasi, ide dan tuntutan masyarakat , maka jumlah skor tersebut dapat di uji melalui rentang kreteria sebagai berikut :



Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari 28 responden menghasilkan nilai skor sebesar 111 jika dimasukkan dalam rentang kreteria, maka skor angka 111 terletak diantara 84 – 112 yang berada pada daerah baik . Ini artinya bahwa penilaian sekolah terhadap peran komite untuk memediator dalam menampung aspirasi, ide dan tuntutan masyarakat dalam kategori baik. Selanjutnya apabila dilihat dari prosentase peran komite dalam menampung aspirasi, ide dan tuntutan masyarakat

pendidikan yang dilaksanakan oleh komite mencapai 79,26% ($111/140 \times 100\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa komites cukup maksimal berpartisipasi dalam hal mediator tentang menampung aspirasi, ide dan tuntutan masyarakat.

Hasil Penelitian tentang peran komite sebagaimana dijelaskan di atas dapat dirangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4:20 : Peran Komite dalam memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol dan mediator program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya

No	PERAN KOMITE	Bobot	%	Kategori
MEMBERI PERTIMBANGAN				
1	Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek kebijakan pendidikan terhadap program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya	77	55,00%	Cukup Baik
2	Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek program pendidikan terhadap program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya	96	68,57%	Baik
3	Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek Rancangan Pendapatan dan Belanja Sekolah terhadap program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya	107	76,43%	Baik
4	Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek criteria tenaga kependidikan terhadap program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya	97	69,29%	Baik
MEMBERI DUKUNGAN				
6	Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek dorongan orang tua berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan terhadap program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya	90	64,29%	Baik
7	Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek penggalangan dana untuk pembiayaan pendidikan dalam program	70	50%	Cukup

	Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya			Baik
8	Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan dalam program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya	114	81,43%	Sangat Baik
SEBAGAI PENGONTROL				
10	Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan evaluasi kegiatan terhadap program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya	79	56,43%	Cukup Baik
11	Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya	100	71,43%	Cukup Baik
12	Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan pengawasan terhadap kebijakan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya	102	72,86%	Cukup Baik
SEBAGAI MEDIATOR				
13	Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya	102	72,86%	Cukup Baik
14	Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya	111	79,26%	Cukup Baik
Kriteria 0 – 28 (0% - 14,29%) = Tidak Baik 28 – 56 (14,29% - 40%) = Kurang Baik 56 – 84 (40% - 60%) = Cukup Baik 84 – 112 (60% - 80%) = Baik 112 – 140 (80% - 100%) = Sangat Baik				

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Komite Sekolah dalam memberi pertimbangan dari aspek kebijakan berada dalam kategori cukup baik dengan tingkat partisipasi dalam memberi pertimbangan dari aspek program pendidikan sekolah mencapai berada dalam kategori baik. Dalam hal memberi pertimbangan dari aspek rencana anggaran dan belanja juga berada dalam kategori baik .
2. Peran Komite Sekolah dalam memberi dukungan dari aspek dorongan orang tua berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan berada dalam kategori baik. Peran komite dalam memberi dukungan dari aspek menggalang dana dalam pelayanan pendidikan berada dalam kategori kurang baik dengan tingkat partisipasi yang kurang. Peran komite dalam memberi dukungan dari mendorong komitmen masyarakat dalam pelayanan pendidikan mencapai berada dalam kategori baik .
3. Peran Komite Sekolah dalam memberi kontrol dari aspek evaluasi kegiatan dalam pelayanan pendidikan berada dalam kategori baik dengan tingkat partisipasi yang baik.. Peran komite dalam memberi kontrol dari aspek melakukan pengawasan terhadap program penyelenggaraan pendidikan berada dalam kategori baik .
4. Peran Komite Sekolah dalam memediator dari aspek melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah dalam pelayanan pendidikan berada dalam kategori baik dengan tingkat partisipasi baik. Peran Komite Sekolah

dalam memediator dari aspek menampung aspirasi, ide dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan pendidikan berada dalam kategori baik dengan tingkat partisipasi yang baik pula.

B. S A R A N

1. Disarankan agar Komite Sekolah dapat meningkatkan perannya dalam memberi pertimbangan terhadap program peningkatan mutu pelayanan pendidikan di satuan pendidikan SD / SMP di Kecamatan Wewewa Selatan
2. Disarankan agar Komite Sekolah dapat meningkatkan perannya dalam memberikan dukungan yang lebih maksimal pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan SD /SMP di Kecamatan Wewewa Selatan
3. Disarankan agar Komite Sekolah dapat meningkatkan perannya lebih maksimal dalam pengontrol program peningkatan pelayanan di satuan pendidikan SD / SMP yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pendidikan sangat diperlukan dalam menunjang efektifitas proses pembelajaran. di Kecamatan Wewewa Selatan
4. Disarankan agar Komite Sekolah dapat meningkatkan perannya lebih maksimal dalam memediator peningkatan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan terutama membangun koordinasi yang baik, serta transparansi dalam penyusunan rencana anggaran Belanja Sekolah, sehingga jelas program kegiatan yang didanai Komite dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas, Dirjen Dikdas. (2002). Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, hal :1-82.
- Kepmendiknas, Nomor : 044/U/2002. Acuan pembentukan komite sekolah, Hal :69-74
- Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah Dirjen Dikdasmen, Depdiknas, Konsultan , Dr. Dasan Budimansyah
- Memahami Paradiguna Baru Pendidikan Nasional dalam UU Sisdiknas, Poksi IV FPG DPR RI, Prof. Doktor Arifin Anwar , Tahun 2003
- Making Public School Efecctive, oleh R.R Edward (Washington Dc. Eric Dokumen Reproduction Service (1979), Hal : 15
- Improving Educational Effeciency In Developing Countries Vol : 18 No.1 (1988)
- An Inroduction To School Planning In The World, Terjemahan Setiawan Yogyakarta, Gajah Mada University Press, (1984)
- Artikel Majalah, Kartono, St. (2005) Komite Sekolah sebagai salah satu Instrumen baru dalam dunia Pendidikan dalam jurnal gerbang majalah pendidikan , V (2), 21-24
- Nasichin, SH (2001) Peranan Dewan Sekolah di Era Otonomi Daerah, Dalam Buletin Pusat Perbukuan, Depdiknas v (5), 4-5
- Makalah yang dipresentasikan, Kodi Mete, Kornelis , Dr (2013) Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat daya , Makalah disajikan pada acara Seminar sehari dalam rangka hari Ulang Tahun ke-36 di SMA Manda Elu, GSG Weetebula
- Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah. Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (2001). Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Sekolah : Konsep dan pelaksanaan .
- The New Public Service, Serving , Not Steering, oleh Janet V. Denhardt and Robert B. Denhardt (M.E Sharpe Armonk New York London, England)
- The Spirit of Public Administrotion ,H. George Frederickson (Jossey – Bass Publishers) San Fransisco

- Administration The Word and The Science, oleh A. Dunsure (A .
HALSTED PRESS BOOK)
- Metode Penelitian Administrasi Publik, Pasolong Harbani, (2012)
Alfabeta , Bandung
- Strategi Pembaharuan Administarsi dan Manajemen Publik , Prof. Dr. H.
Juni Pranoto (2011) Alfabeta , Bandung
- Undang-undang RI nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Awaludin. Fahmi, Peran Komite Sekolah, 2012
- Budimansyah, D, Fungsi Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah Dalam
Penyelenggaraan Pendidikan, 2012
- Word Friend Indonesia, Teori Dasar Jaringan, 2013
- [http.layartekno.blokspot.com](http://layartekno.blokspot.com), Pengertian, Tahapan, Macam-Macam dan
Manfaat Kultur Jaringan, 2012
- [http.aprazetyanto.blokspot.com](http://aprazetyanto.blokspot.com), Teori Ketergantungan, 2006
- Thomson, Teori Ketergantungan Terhadap Sumber Daya, 1967
- Pfefer dan Saalarchik, Hubungan Interorganisasional, 1978
- Utami Dewi, 2012 Thesis , Peran Komite dalam Penyelenggaraan
Pendidikan di SMAN 1 Temon
- Amina Rahmawati (2009) Peran Komite Sekolah Dasar Muhammadiyah
Demangan Yogyakarta
- Eka Karweti , Jurnal Pendidikan vol 2010, Jurnal UPI Education

No	Item Pernyataan Peran Komite Sekolah	Klasifikasi				
		SB	B	CB	KB	TB
MEMBERI PERTIMBANGAN						
1	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek kebijakan pendidikan terhadap program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
2	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek program pendidikan terhadap program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
3	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek Rancangan Pendapatan dan Belanja Sekolah terhadap program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
4	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek criteria tenaga kependidikan terhadap program Pelayanan Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
MEMBERI DUKUNGAN						
6	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek dorongan orang tua berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan terhadap program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
7	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek penggalangan dana untuk pembiayaan pendidikan dalam program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
8	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan dalam					

	program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
9	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek mendorong komitmen masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
SEBAGAI PENGONTROL						
10	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan evaluasi kegiatan terhadap program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
11	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
12	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan pengawasan terhadap kebijakan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
SEBAGAI MEDIATOR						
13	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
14	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
15	Bagaimana peran komite sekolah dalam					

	memberikan pertimbangan dari aspek menampung aspirasi, ide dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					
16	Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dari aspek membangun kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan program Pendidikan Dasar di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya					

UNIVERSITAS TERBUKA

BIODATA PENELITI

Nama/NIM :Lukas Tamo Ama/018396804
Tempat dan Tanggal Lahir : Wee Mete, 23-12-1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anggota Keluarga :-
Istri :-
Nama :-
Tempat dan Tanggal Lahir :-
Pekerjaan :-
Alamat Rumah dan Telp. : Wee Mete,Ds Mandungo,Kec.Wewewa Selatan
No. Hp. : 081353515815
Alamat E-mail : lukas.tamoama@yahoo.co.id
Pengalaman Pendidikan :
 1. SDK Manola Manola : 1980
 2. SMP St. Aloysius Weetebula : 1983
 3. SPG St. Alfonsus Weetebula : 1986
 4. Seminari Mataloko : 1988
 5. S1 Unwira Kupang : 1997
 6. Terdaftar di Pascasarjana UT : 2011.2
Pengalaman Pekerjaan :
 1. Guru SDK Katikuloku Sumteng : 1988-1989
 2. Guru SMP Kasimo Kererobho : 1989-1990
 3. Guru SD Inpres Karoso Kodi : 1990-1992
 4. Guru SMK Wirakarya Kupang : 1997-1999
 5. Guru SMPN W. Selatan : 1999-2001
 6. Guru SMP N 3 Katikutana : 2001-2006
 7. Guru SMPN 3 W. Barat : 2006-2011
 8. Kepala SMP N 1 W. Selatan : 2012-sekarang
Prestasi atau Penghargaan yang pernah diraih :

Tambolaka, Oktober.2013

Peneliti,

Lukas Tamo Ama
NIM:018396804

LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Peran Komite Sekolah Dalam Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dasar Di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya
2. Identitas Peneliti :
 - N a m a : Lukas Tamo Ama
 - NIM : 018396804
 - UPBJJ : Kupang
 - Alamat Rumah : Wee Mete, DS. Mandungo. Wewewa Selatan-Kab. Sumba Barat Daya
 - Telephone/Fax : 081353515815
 - E-mail : lukastamoama@yahoo.co.id
3. Pembimbing I :
 - N a m a : DR. Ajis Salim Adang Djaha, M.Si
 - NIP : 196404051990031004
 - Pangkat/Golongan: Pembina-IV/a
 - Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Undana
 - Telephone/Fax : 081353736500
 - E-mail : ajissalim@yahoo.com
4. Pembimbing II :
 - N a m a : Prof. DR. Udin S. Winata Putra, MA
 - NIP : 194510071973021002
 - Pangkat/Golongan:
 - Alamat Kantor :
 - Telephone/Fax :
 - E-mail : udin@ut.ac.id

Kupang, 15 Juni 2013

Mengetahui,
Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr .Ajis Salim Adang Djaha, M.Si
NIP. 196404051990031004Prof Dr. H. Udin S. Winata Putra, MA
NIP. 194510071973021001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 41515.pdf
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Raya Kadula Nomor : - Telp / Fax : -
TAMBOLAKA

Nomor : 070/168 /BKBPPM/SBD/ V/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Tambolaka, 02 Mei 2013
Kepada
Yth. Camat Wewewa Selatan
di -
Manola

Menunjuk Surat Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJ-UT) Kupang Nomor : 1005/ UN31.42/LL / 2013 tanggal 09 April 2013 hal Mohon Ijin untuk Melakukan Penelitian dan setelah mempelajari rencana kegiatan/ proposal yang diajukan oleh peneliti maka dapat diberikan Surat Keterangan/ Rekomendasi kepada :

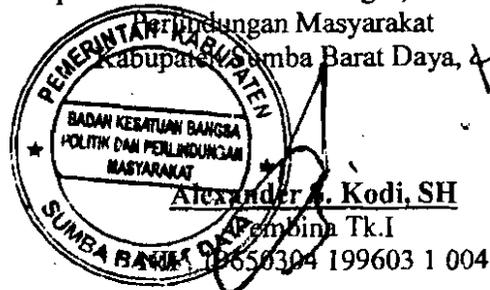
Nama : Lukas Tamo Ama
NIM : 018396804
Program Pasca Sarjana : Magister Administrasi Publik
Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian dengan Judul : " PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN WEWEWA SELATAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA " sejak surat ini dikeluarkan sampai selesai.

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil penelitian secara tertulis kepada Bupati Sumba Barat Daya Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan



Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. NTT di Kupang;
3. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. NTT di Kupang
4. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka
5. Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJ-UT) Kupang di Kupang;
6. Yang bersangkutan di tempat